

EDISI 78 / 2023

EDUKASI

K E U A N G A N

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PKN STAN 2023

Gerbang Membentang Pengantar Sang Bakal Pelajar





Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris BPPK

PEMIMPIN REDAKSI
Iwan Khrisnawan

REDAKTUR
Chobin Martanto
Mia Prasetyawati
Sri Suryanovi
Lova Adlina Riyanatika
Adfuadi
Rita Dwi Lindawati
Irham Muammar Khalid
Harahap
Rio Suareski
Jamila Lestyowati
Astrid Carera Imanuela
Yuniyati Syarifah
Bambang Kismanto
Andita Trias Nur Azizah
Zahar Angga Setiawan
Irawan Purwo Aji
Leliantika Handitya Deastri
Lestari Dwi Pribadi
Achmat Subekan
Gunawan
Trisni Syamsu Indyaputri
Primandita Fitriandi
Sukma Mayangsari

EDITOR
Arimbi Putri
Klemens Amy Novianto
Puspa Paradisa Puteri H

DESAIN GRAFIS
Ivan Rizki Arviandi
Rildan Wardhana

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5, maksimal 2.500 kata. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@kemenkeu.go.id. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

ALAMAT REDAKSI
Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7204131
Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI	3
LINTAS PERISTIWA	4
LIPUTAN UTAMA	6
LIPUTAN KHUSUS	12
PROFIL	15
SERAMBI ILMU	21
KOMUNITAS	34
TAHUKAH KAMU	36
CERITA ALUMNI	38
TIPS & TRIK	42
KESEHATAN	45
RESENSI	50
<i>POINT OF INTEREST</i>	52
GALERI	56



Bahagia
Melayani

Pusdiklat KU

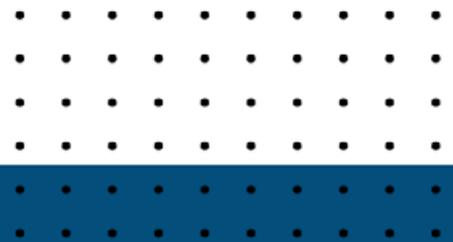


ANDA PELAKU UMKM?

tertarik mempelajari:

- Pemasaran Digital Produk UMKM
- Legalitas atau Perijinan UMKM
- Pembiayaan UMKM
- Pelaporan Keuangan UMKM
- Perpajakan UMKM

terbuka dan gratis untuk masyarakat umum!



yuk ikuti!

E-LEARNING DASAR-DASAR PENGELOLAAN UMKM

 linktr.ee/belajarumkm



SALAM REDAKSI

Mendidik para calon pengelola keuangan negara dapat dikatakan tugas yang mulia namun sangat tidak mudah. Selain harus memperhatikan proses selama pendidikannya, proses penjurangan para calon pengelola keuangan negara ini juga harus dilakukan dengan teliti dan seksama. Filter pertama yang dilaksanakan untuk mendapatkan calon pengelola keuangan negara yang berkualitas yaitu melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN.

Sebagai garda terdepan dalam pencetak calon pengelola keuangan negara yang unggul dan berkarakter, PKN STAN mengarungi berbagai tantangan dan perjuangan. Perjalanan PKN STAN untuk bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap untuk menerima pendidikan abdi negara pengelola keuangan, dapat Anda simak dalam ulasan utama kami, Liputan Utama: SPMB PKN STAN.

Rubrik Liputan Utama akan kami rangkai dengan Liputan Khusus yang akan berbagi tentang informasi penerapan prinsip Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) yang mungkin belum banyak diketahui banyak orang namun sangat penting untuk kehidupan ekonomi berkelanjutan. Pusdiklat Keuangan Umum akan berbagi kisahnya terkait penyelenggaraan seminar ESG dengan narasumber Chatib Basri (Mantan Menteri Keuangan), Reynaldi Hermansjah (PT IIF), dan Heru Rahadyan (Bank Indonesia).

Perkaya bobot informasi Anda dengan rubrik artikel ilmiah populer kami, Serambi Ilmu yang akan menyajikan sejumlah analisis fakta terhadap kasus-kasus terkini. Ulasan mengenai buku-buku edukatif juga menanti untuk Anda resapi melalui rubrik Resensi.

Tak lengkap rasanya jika bobot informasi tak diimbangi dengan rubrik-rubrik renyah kami seperti Point of Interest, Galeri, Kesehatan, Komunitas, dan sederet rubrik lainnya yang tentunya sayang jika Anda lewatkan. Bersama Majalah Edukasi Keuangan, kami temani waktu bersantai Anda dengan tanpa menghabiskan waktu dengan sia-sia.

Lintas Peristiwa

Agustus-September

ARTIKEL: IVAN RIZKI A.
FOTO: DOKUMENTASI BPPK

HUT RI ke-78



Dalam rangka memeriahkan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, BPPK mengadakan sejumlah perlombaan menarik untuk para pegawai BPPK, di antaranya estafet gelas, *balloon race*, sarung *run*, bakiak beregu, dan pensil dalam botol. Kegiatan ini dilangsungkan di lapangan parkir Sekretariat BPPK pada Jumat, 18 Agustus 2023 dengan para peserta serentak mengenakan pakaian olahraga bernuansa merah dan putih.

Guna mempererat solidaritas antarpegawai dan mengolah fisik untuk lebih bugar, BPPK turut menyelenggarakan serta berpartisipasi dalam sejumlah perhelatan olahraga di lingkungan Kementerian Keuangan. Selama periode Agustus-September 2023, BPPK mengikuti pertandingan sepak bola antarunit Eselon I Kementerian keuangan melawan tim Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pada 15 September 2023 di Stadion Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur. Selain itu, tim BPPK juga rutin mengadakan pertandingan voli yang dimeriahkan sejumlah pegawai BPPK.



Olahraga BPPK



Rangkaian KLF September

Rangkaian perhelatan akbar dari BPPK, Kemenkeu Learning Festival (KLF) tahun 2023, dimulai dengan Launching KLF 2023 yang menghadirkan sejumlah suguhan dari para talenta terbaik BPPK. Peluncuran KLF 2023 ditandai secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Kepala BPPK, Andin Hadiyanto, pada 12 September 2023 di Aula Gedung B lantai 5 Sekretariat BPPK. Menyusul peluncuran tersebut, rangkaian KLF dilanjutkan dengan LOKeR Spesial bertajuk Future of Corporate Universities: How Corpu Drive the Organizational Performance, yang menghadirkan pakar *corporate university* dari berbagai instansi terkemuka. Acara ini diselenggarakan di tempat yang sama pada 14 September 2023 lalu.



PUSPA PARADISA PUTERI HADHYANTI

Menjaring Pengelola Keuangan Negara Unggul Melalui SPMB PKN STAN 2023

Sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN senantiasa mendukung percepatan Indonesia untuk menjadi negara maju melalui penciptaan tenaga ahli di bidang keuangan negara yang unggul dan berkarakter. Untuk dapat menciptakan sumber daya manusia pengelola keuangan negara yang unggul, diperlukan sistem penerimaan mahasiswa yang profesional melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Keuangan Negara STAN (SPMB PKN STAN).

SPMB PKN STAN dilaksanakan untuk memenuhi formasi kebutuhan sumber daya manusia pengelola keuangan negara

di Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas Bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN.

Seperti tahun sebelumnya, SPMB PKN STAN kembali diselenggarakan di tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan akan pengelola negara sebagaimana tertuang

dalam pengumuman Direktur PKN STAN nomor PENG-32/PKN/2023 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Program Studi Diploma IV Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2023. Berdasarkan pengumuman tersebut, Politeknik Keuangan Negara STAN membuka tiga jalur dalam penerimaan mahasiswa baru yakni jalur reguler, afirmasi kewilayahan, dan pembibitan.

Jalur reguler yaitu penerimaan mahasiswa baru dari seluruh lulusan pendidikan menengah atas di seluruh wilayah di Indonesia. Selanjutnya, jalur afirmasi kewilayahan merupakan jalur yang dikhususkan bagi para putra-putri dari wilayah afirmasi. Sedangkan jalur pembibitan adalah jalur penerimaan mahasiswa baru melalui mekanisme kerja sama PKN STAN dengan

pemerintah daerah yang ditujukan untuk mengisi formasi/kebutuhan pegawai di pemerintah daerah mitra kerja sama tersebut.

SYARAT PENDAFTAR SPMB PKN STAN

Sebelum melakukan pendaftaran, terdapat persyaratan yang perlu diperhatikan oleh para pendaftar, baik persyaratan umum maupun khusus. Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh para pendaftar adalah sebagai berikut.

1. Lulusan SMA/SMK/ sederajat tahun 2021, 2022, atau calon lulusan SMA/SMK/ sederajat tahun 2023.
2. Usia maksimal pada tanggal 1 September 2023 adalah 21 tahun, dalam pengertian calon peserta yang lahir sebelum tanggal 1 September 2002 tidak diperkenankan untuk mendaftar. Usia minimal pada tanggal 1 September 2023 adalah 14 tahun.
3. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari ketergantungan narkoba.
4. Bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali karena ketentuan agama/adat.
5. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindik/bekas tindik di telinga lebih dari 1 (satu) pasang (telinga kiri dan kanan).
6. Belum pernah menikah/kawin dan bersedia untuk tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan.
7. Peserta tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan SPMB PKN STAN pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain persyaratan umum, terdapat pula persyaratan khusus bagi para pendaftar SPMB PKN STAN sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

1. Nilai Ujian pada Ijazah dan Nilai Rapor berlaku ketentuan sebagai berikut:

	Reguler dan Afirmasi Kewilayahan	Pembibitan
Lulusan Tahun 2021 dan 2022	Memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00.	Memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 75,00 dengan skala 100,00.
Calon lulusan tahun 2023	Nilai rata-rata rapor untuk komponen pengetahuan pada 5 (lima) semester (semester gasal dan genap untuk kelas X dan XI serta semester gasal kelas XII) tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00 dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00	Nilai rata-rata rapor untuk komponen pengetahuan pada 5 (lima) semester (semester gasal dan genap untuk kelas X dan XI serta semester gasal kelas XII) tidak kurang dari 75,00 dengan skala 100,00 dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 75,00 dengan skala 100,00

2. Nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) berlaku ketentuan sebagai berikut:

Reguler	Afirmasi Kewilayahan	Pembibitan
a. Tes Potensi Skolastik/ TPS minimal 600 (rata-rata seluruh subtes TPS); b. Tes Literasi dalam Bahasa Indonesia minimal 550; c. Tes Literasi dalam Bahasa Inggris minimal 450; dan d. Tes Penalaran Matematika minimal 500.	a. Tes Potensi Skolastik/ TPS minimal 400 (rata-rata seluruh subtes TPS); b. Tes Literasi dalam Bahasa Indonesia minimal 375; c. Tes Literasi dalam Bahasa Inggris minimal 325; dan d. Tes Penalaran Matematika minimal 325.	Tidak dipersyaratkan Nilai UTBK

3. Khusus Jalur Afirmasi Kewilayahan ditambahkan syarat sebagai berikut:

a. Peserta dari Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat:

- 1) memiliki surat keterangan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat yang menyatakan bahwa peserta merupakan peserta ADEM Provinsi Papua dan Papua Barat; dan
- 2) memiliki orang tua (ayah atau ibu kandung) lahir di kota/kabupaten afirmasi yang dipilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah atau ibu kandung peserta. Khusus provinsi pada wilayah afirmasi yang mempunyai kuota per provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, memiliki orang tua (ayah atau ibu kandung) yang lahir di provinsi afirmasi yang dipilih, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah atau ibu kandung peserta.

b. Peserta dari Afirmasi Non-ADEM:

- 1) telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat di kota/kabupaten afirmasi yang dipilih. Khusus provinsi pada wilayah afirmasi yang mempunyai kuota per provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur telah menyelesaikan Sekolah Dasar

(SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat di provinsi afirmasi yang dipilih; dan

- 2) memiliki orang tua (ayah atau ibu kandung) yang lahir di kota/kabupaten afirmasi yang dipilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah atau ibu kandung peserta. Khusus provinsi pada wilayah afirmasi yang mempunyai kuota per provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur memiliki orang tua (ayah atau ibu kandung) yang lahir di provinsi afirmasi yang dipilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah atau ibu kandung peserta.

4. Khusus Jalur Pembibitan ditambahkan syarat sebagai berikut:

- a. berdomisili pada kota/kabupaten pembibitan yang dipilih dibuktikan dengan KTP/Kartu Keluarga; dan

- b. memiliki orang tua (ayah atau ibu kandung) lahir di Kota/Kabupaten yang melaksanakan kerja sama pembibitan yang dipilih, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah atau ibu kandung peserta.

Dalam hal orang tua (ayah atau ibu kandung) lahir di kota/kabupaten di wilayah eks kota/kabupaten induk yang saat ini telah menjadi wilayah kota/kabupaten pemekaran, maka tempat lahir orang tua (ayah atau ibu kandung) dapat berada di kota/kabupaten induk.

Peserta kemudian melakukan pendaftaran secara *online* melalui portal dikdin.bkn.go.id dan smb.pknstan.ac.id. Setelah melakukan pendaftaran, peserta akan melalui serangkaian tahapan seleksi. Pertama, Seleksi Administrasi. Dalam tahap ini, peserta akan diseleksi berdasarkan syarat administrasi. Kedua, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Dalam tahap ini, peserta melaksanakan SKD menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tes yang diujikan meliputi Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Inteligensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Ketiga,



Seleksi Lanjutan I. Tahap ini terdiri dari Tes Kesehatan dan Kebugaran serta Tes Psikologi. Terakhir, Seleksi Lanjutan II. Pada tahapan ini peserta akan mengikuti Tes Wawancara yang dilaksanakan semi *online*. Sebagai catatan, peserta yang dapat mengikuti setiap tahapan seleksi adalah peserta yang sudah lolos dalam seleksi tahapan sebelumnya.

Pada tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah formasi dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2022, jumlah formasi Diploma IV Akuntansi Sektor Publik sejumlah 300, Diploma IV Manajemen Keuangan Negara sejumlah 350, dan Diploma IV Manajemen Aset Publik sejumlah 100. Sehingga total jumlah formasi yang tersedia adalah 750. Tahun ini total jumlah formasi yang tersedia sejumlah 1.100 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program	Reguler	Afirmasi Kewilayahan	Pembibitan	Jumlah
1.	Diploma IV Akuntansi Sektor Publik	404	44	22	470
2.	Diploma IV Manajemen Keuangan Negara	365	36	19	420
3.	Diploma IV Manajemen Aset Publik	171	20	19	210
Jumlah		940	100	60	1.100

Persaingan memperebutkan jumlah formasi yang tersedia cukup ketat. Total terdapat 44.820 jumlah pendaftar yang terdiri dari 43.047 pendaftar Jalur Reguler, 928 pendaftar Jalur Afirmasi Kewilayahan, dan 845 pendaftar Jalur Pembibitan. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Jalur	Jumlah Pendaftar	Lulus Administrasi	Lulus SKD	Lulus Seleksi Lanjutan I	Lulus Seleksi Lanjutan II
1.	Reguler	43.047	7.985	2.822	1.047	953
2.	Afirmasi Kewilayahan	928	621	147	110	100
3.	Pembibitan	845	517	118	53	47
Jumlah		44.820	9.123	3.087	1.210	1.100

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah mahasiswa yang diterima sesuai dengan alokasi kuota penerimaan sejumlah 1.100. Meski demikian, terdapat perbedaan jumlah penerimaan per jalur. Hal ini disebabkan kuota Jalur Pembibitan sejumlah 60 hanya terpenuhi sebanyak 47 sehingga sisa kuota sebanyak 13 dialihkan ke Jalur Reguler.

Melalui pelaksanaan SPMB PKN STAN yang profesional, diharapkan dapat diperoleh putra putri terbaik bangsa yang siap ditempa menjadi pemimpin dan agen perubahan yang unggul, beretika, modern, dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara demi mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial.





PUSPA PARADISA PUTERI HADHYANTI

Jalur Pembibitan PKN STAN: Terobosan Akselerasi Pemenuhan Kebutuhan SDM di Daerah

Pada tahun 2023, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) kembali menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB). Hal ini sesuai dengan pengumuman Direktur PKN STAN nomor PENG-32/PKN/2023 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Program Studi Diploma IV Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023.

Terdapat hal baru dalam pelaksanaan SPMB PKN STAN kali ini. Jika pada tahun sebelumnya, jalur penerimaan mahasiswa terdiri dari dua jalur saja yaitu Jalur Reguler dan Jalur Afiriasi Kewilayahan, kini terdapat satu jalur lagi yang disebut Jalur Pembibitan. Apa itu Jalur Pembibitan?

Jalur Pembibitan merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru lulusan pendidikan menengah atas di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atau Kementerian Agama, seperti Sekolah

Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Kelompok Belajar Paket C/ Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Teologi Kristen/Pendidikan Keagamaan Katolik/Utama Widya Pasraman/ Pendidikan Keagamaan Khonghucu/ sekolah keagamaan lain/ sederajat melalui mekanisme kerja sama PKN STAN dengan pemerintah daerah. Pada jalur ini, mahasiswa yang telah lulus pendidikan nantinya akan ditempatkan pada instansi pemerintah daerah asal.

Hal yang mendasari diadakannya Jalur Pembibitan karena realitasnya sampai saat ini kebutuhan sumber daya manusia di bidang keuangan negara pada pemerintah daerah dirasa masih sangat kurang. Kemunculan jalur ini merupakan salah satu terobosan dalam rangka melakukan akselerasi pemenuhan kebutuhan tersebut. Dengan terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia di bidang keuangan negara pada pemerintah daerah, diharapkan akan mendorong tercapainya tujuan bernegara sebagaimana

diamanatkan dalam Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi "...untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.."

Jalur Pembibitan menjadi salah satu hal yang unik dalam penyelenggaraan SPMB PKN STAN Tahun 2023 ini sebab baru pertama kalinya dilakukan. Tentunya hal ini memiliki tantangan tersendiri. Karena baru pertama kali dilakukan, hingga kini PKN STAN masih mencari bentuk yang tepat dalam pelaksanaan jalur ini. Koordinasi yang lebih intens perlu dilakukan dengan Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan serta pemerintah daerah mitra kerjasama. Dalam hal ini perlu strategi komunikasi yang baik

untuk memastikan segala informasi dapat tersampaikan kepada pihak-pihak terkait, terutama untuk dapat menjaring lebih banyak peminat Jalur Pembibitan dari pemerintah kota/kabupaten mitra kerjasama pembibitan. Dengan demikian, peluang untuk mendapatkan mahasiswa terbaik dari daerah bisa lebih maksimal. Selain itu, diperlukan juga koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dokumen kerjasama dengan klausul yang disepakati bersama. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya perlu ada komitmen yang kuat antara kedua belah pihak mengingat terdapat konsekuensi pembiayaan atas jalur pembibitan ini.



Dalam pelaksanaan perdananya, terdapat enam pemerintah kota/daerah yang mendapat kesempatan menjadi daerah yang pertama kali mengikuti program ini, yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jember, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kota Cirebon. Total alokasi kuota sebanyak 60 dengan masing-masing kabupaten/kota mendapatkan alokasi kuota sebanyak 10. Minat pemerintah kota/daerah terhadap Jalur Pembibitan ini cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pemerintah daerah lain yang menghubungi PKN STAN untuk dapat diikutkan pada program Jalur Pembibitan di SPMB tahun berikutnya.



Selain Jalur Pembibitan, hal lain yang tak kalah menarik dari SPMB PKN STAN kali ini yaitu Jalur Afirmasi Kewilayahan tidak hanya diperuntukkan kepada wilayah Papua dan Maluku saja tetapi diperluas menjadi daerah tertinggal, terdepan dan terluar (Daerah 3T). Adapun wilayah dimaksud terdapat pada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sesuai dengan misi PKN STAN, dengan adanya perluasan ini diharapkan keberagaman akan semakin terasa dan jangkauan pemberian kesempatan bagi putra putri bangsa untuk mendapatkan akses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas semakin luas.

Seperti yang diketahui bahwa sebelum melakukan pendaftaran, terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan dan



dipenuhi oleh pendaftar baik syarat umum maupun syarat khusus. Dalam hal ini, peserta yang akan mendaftar perlu lebih cermat dan teliti mengingat di tahun 2023 ini PKN STAN membuka tiga jalur yakni Jalur Reguler, Jalur Afirmasi Kewilayahan, dan Jalur Pembibitan dimana masing-masing jalur memiliki syarat khusus yang berbeda.



Selain itu, peserta juga perlu membaca dengan baik mengenai tata cara pendaftaran SPMB PKN STAN Tahun 2023. Terdapat beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pendaftar antara lain:

1. Hanya melakukan pendaftaran pada portal dikdin.bkn.go.id dan tidak melakukan kunci data pada portal spmb.pknstan.ac.id sehingga proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan;
2. Tidak teliti dalam penulisan data/identitas diri sehingga terjadi kesalahan penulisan;
3. Tidak teliti dalam mencermati persyaratan, khususnya untuk jalur afirmasi kewilayahan dan pembibitan (syarat lokasi sekolah, domisili, tempat lahir orang tua, dan lain-lain);
4. Kurang perhatian terhadap adanya batas waktu (pendaftaran/pembayaran/lainnya);
5. Kesalahan dalam upload berkas.



SEMINAR

Sustainable Development Financing
Challenges Based on Environmental, Social,
Governance (ESG).



SATRIA AJI SETIAWAN

Program Unggulan Pusdiklat Keuangan Umum Tahun Anggaran 2023

Perjanjian Paris mengharuskan Indonesia untuk menguraikan dan mengomunikasikan aksi ketahanan iklim pasca 2020 dalam dokumen Kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution/NDC*). Dokumen NDC menetapkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, yakni sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030.

Penerapan prinsip ESG menjadi wujud nyata Indonesia dalam merespon tantangan perubahan iklim (*climate change*), tuntutan penerapan keuangan berkelanjutan, dan mendorong target pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan menerapkan ESG, Indonesia dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi emisi karbon serta dampak negatif lingkungan yang lainnya. Selain itu, penerapan ESG dapat meningkatkan kesejahteraan

sosial dengan memperhatikan hak asasi manusia dan kondisi kerja yang layak serta memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia dengan mendorong investasi yang bertanggung jawab dan memperkuat kebijakan tata kelola perusahaan yang baik.

Namun, di balik berbagai peluang yang ada, terdapat pula banyak tantangan terkait dengan penerapan prinsip ESG. Penerapan prinsip ESG masih terbilang baru di Indonesia, sehingga masih banyak orang yang kurang memahami konsep ini. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam mempromosikan dan mengintegrasikan ESG dalam kebijakan dan praktik perusahaan di Indonesia. Selain itu, untuk mengimplementasikan ESG, dibutuhkan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Namun, di Indonesia masih terdapat keterbatasan dalam hal akses dan kualitas data yang dibutuhkan. Selain itu, kurangnya regulasi terkait ESG juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan ESG di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam rangka meningkatkan *awareness* masyarakat, khususnya pegawai di Kemenkeu, terkait dengan peluang dan tantangan penerapan prinsip ESG, maka Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan Seminar dengan tema Peluang dan Tantangan Pembiayaan Berbasis ESG pada tanggal 14 Juni 2023 dengan narasumber Chatib Basri, Reynaldi Hermansjah (PT.IIF), dan Heru Rahadyan (Bank Indonesia). Materi yang disampaikan dalam seminar adalah tentang gambaran umum pembiayaan berbasis ESG, praktik-praktik penerapan ESG, serta peluang dan tantangan penerapan ESG di Indonesia. Seminar dilaksanakan secara *hybrid* dan dihadiri oleh 562 peserta dari Kementerian Keuangan, OJK, BI, akademisi, serta masyarakat umum.

Seminar ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Program Unggulan Pusdiklat Keuangan Umum dalam mendukung implementasi ekonomi

hijau untuk keperluan perubahan iklim di Indonesia, dengan tema besar *Green and Sustainable Finance–Human Capital Development and Literacy Series* yang akan berlangsung pada tahun 2023 s.d. 2025. Pada tahun 2023, Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan serangkaian kegiatan, yaitu seminar, pelatihan persiapan sertifikasi, dan sertifikasi ESG.

URGensi IMPLEMENTASI ESG

Chatib Basri menyampaikan bahwa ESG menjadi topik yang hangat diperbincangkan di tataran global, namun gaungnya di Indonesia masih sangat terbatas. Isu lingkungan di negara berkembang adalah barang mewah yang dapat diupayakan setelah orang mencapai pendapatan pada level tertentu. Jadi, selama narasi ini tidak berubah maka akan sulit untuk menyadarkan orang-orang mengenai ancaman perubahan iklim. Di lingkup global, terdapat kekhawatiran tentang isu *climate* dimana pemanasan global diperkirakan akan naik 1,5% tetapi diluar itu terdapat kekhawatiran lain yang muncul yaitu *climate overuse*. Jika langkah mitigasi yang dilakukan oleh banyak negara tidak cukup kuat dalam menangani *climate overuse* maka yang terjadi adalah pemanasan global dapat mencapai lebih dari 1,5%. Jika itu terjadi maka kebutuhan pembiayaan untuk penanganannya akan jauh lebih besar. Bahkan penanganan

dengan *natural based* mungkin tidak akan cukup sehingga itu dibutuhkan *effort* lain.

Senada dengan pernyataan yang dinyatakan Bapak Chatib, Bapak Heru dari Bank Indonesia menyampaikan bahwa potensi kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim lebih tinggi dibandingkan krisis keuangan global 2008 dan pandemi Covid-19. Kerugian akibat Pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai 3,3% dari PDB Global sedangkan kerugian akibat perubahan iklim diperkirakan mencapai 18% dari PDB Global.

Negara Indonesia dan negara-negara di Pasifik mempunyai risiko yang sangat besar terhadap *climate change* karena negara-negara tersebut menghadapi ancaman yang sangat besar, misalnya naiknya permukaan laut terutama di negara-negara pasifik serta banjir, kekeringan panjang, tanah longsor, dan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan terjadinya perubahan iklim di dunia. Indonesia rentan terekspos risiko perubahan iklim dengan estimasi potensi kerugian mencapai lebih dari Rp100 T / tahun dan diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan 40% PDB pada 2048, lebih tinggi dari rata-rata global 18% PDB. Kerugian akibat perubahan iklim dapat ditekan menjadi 4% PDB Indonesia apabila target Paris Agreement tercapai.

'ROAD TO GREENER ECONOMY

Pembiayaan untuk isu *climate change* harus dilakukan dari dua sisi, yaitu sisi *supply* (darimana *finance* itu tersedia) dan *demand* (*ability to deliver*). Dari sisi *supply*, hal pertama yang dilakukan adalah mendapatkan harga yang benar supaya aktivitas ini berjalan *sustainable*. Selama harga dari *fossil fuel* subsidi masih diberikan subsidi, maka akan sulit terjadi transisi kepada *renewable energy*. Untuk mendapatkan harga yang benar maka negara harus melakukan *Domestic Resource Mobilization* (DRM) melalui mereview *tax expenditure* (mengalihkan dari *dirty sector* ke *green sector*), menerapkan *carbon tax* (pajak yang dikenakan atas pembakaran bahan bakar berbasis karbon seperti batubara, minyak, dan gas), dan mengimplementasikan *pigovian tax* (pengenaan pajak pada aktivitas yang menghasilkan eksternalitas negatif). Kemudian BBM itu seharusnya dikenakan cukai karena BBM adalah barang berbahaya untuk lingkungan. Apabila hal ini dilakukan maka dapat meningkatkan *revenue* yang sangat signifikan.

Dari sisi spendingnya, pemberian subsidi harus *targeted* dan dilakukan dengan tepat. Apabila kita berbicara tentang subsidi *fossil fuel* maka pihak yang diuntungkan adalah *middle* dan *upper class*. Jadi, jika pemerintah ingin membantu kelompok yang rentang, maka dapat dilakukan melalui transfer langsung seperti BLT dan PKH.

Secara praktik, PT IIF menyampaikan bahwa integrasi ESG adalah aspek yang krusial dalam pengambilan keputusan investasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan ESG, investor/proyek dapat mencapai hasil keuangan jangka panjang yang lebih baik dan berkontribusi untuk masa depan yang berkelanjutan. Namun, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pembiayaan berbasis ESG, baik dari sisi *financial institution, borrower, market*, maupun *resources*.





Bank adalah penghasil emisi karbon terbesar, yang berasal dari emisi karbon debitur yang harus diakui bank secara proporsional. Untuk menurunkan emisi karbon, Bank harus meningkatkan porsi pembiayaan rendah emisi (tidak harus hijau) sehingga menjadi katalis debitur Bank untuk lebih ramah lingkungan. Adapun dukungan Bank Indonesia dalam pengembangan Keuangan Berkelanjutan dilakukan melalui:

1. Kalkulator Hijau (berkolaborasi dengan Kemenko Marves);

Kalkulator hijau dapat digunakan perusahaan secara *voluntary* dan gratis untuk mengukur emisi karbon dalam rangka pemenuhan standar publikasi berkelanjutan. Kalkulator hijau direkomendasikan untuk UMKM dan Perusahaan dengan aktivitas non kompleks yang belum diatur secara sektoral oleh regulator atau asosiasi industri.

2. Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) Hijau;

Kalkulator Hijau merupakan suatu bentuk dukungan agar perusahaan mampu mengukur dan memublikasikan emisi secara mudah dan murah. Bank akan melaporkan emisi dari kredit yang diberikan (emisi debitur yang diakui bank secara proporsional) kepada Bank Indonesia melalui LBUT.

3. Kajian Risiko Transisi Perubahan Iklim (berkolaborasi dengan Kemenko Marves);

Bank Indonesia terus meningkatkan riset dan asesmen terkait perubahan iklim.

5. Kebijakan Makropudensial Hijau.

Bank Indonesia memberikan insentif bagi Bank untuk mendorong pembiayaan properti hijau dan kendaraan listrik melalui pengaturan LTV dan UM, serta mendorong pembiayaan melalui pembelian *sustainable bond* dan *blended finance*.

Penanganan *climate change* membutuhkan komitmen negara-negara secara kolektif. Tidak ada satupun negara yang sanggup membiayai *climate finance* ini sendiri bahkan Amerika atau negara lain karena biaya yang dibutuhkan sangat besar sekali. Permasalahan utama terletak pada energi transisi. Perpindahan dari *brown to green energy* membutuhkan biaya yang tinggi. Apabila dari *Domestic Resource Mobilization* tidak bisa membiayai, maka harus ada skema pendanaan campuran (*blended finance*) dengan kombinasi dari *Domestic Resource Mobilization*, *private financing* dan berbagai insentif lain (LTV, Uang Muka Hijau, RPIM Hijau), filantropi, dan investor.



ARIMBI PUTRI

Profil Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Bambang Juli Istanto:

Pemimpin Berintegritas yang Menyederhanakan Hidup



Bambang Juli Istanto, adalah salah satu dari jajaran pejabat yang namanya lahir dan besar di BPPK. Perjalanan panjang Bambang hingga menduduki posisinya saat ini tentu bukan suatu keberuntungan. Bapak tiga anak yang saat ini menjabat Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan ini merupakan pribadi yang cemerlang namun tetap jujur, rendah hati, dan membumi dalam kesehariannya.

Pribadi yang santun, pekerja keras, dan berintegritas yang dimiliki Bambang tentu tidak lepas dari nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarganya. Semasa muda, Bambang sudah diajarkan untuk bekerja keras dan tidak berpangku tangan. Ayahnya yang merupakan seorang kepala sekolah kerap meminta Bambang untuk menggarap sawah miliknya di kampung halamannya, Karanganyar, Jawa Tengah.

“Saya dari kecil tuh ya dibiasakan memang sudah ditanamkan untuk bekerja. Kalau dulu guru ngajar itu cuma setengah hari, jadi bapak saya itu sorenya ke sawah. Saya diajak untuk *nggarap* sawah itu,” kisahnya.

Hingga saking seringnya diminta untuk bekerja menggarap sawah, Bambang acapkali ‘mengungsi’ ke rumah kakeknya ketika memasuki masa-masa ujian sekolah. Hal itu pula yang terbawa hingga ia menempuh Pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta.

Bambang pun memilih untuk tinggal di sebuah indekos meski jarak rumah ke kampusnya tidak terlalu jauh.

“Dari Karanganyar ke UNS dekat cuma sekitar 30 menit naik motor, tapi saya ngekos biar kalau ujian-ujian enggak disuruh kerja *nyangkul* sawah,” kenangnya disertai gelak tawa.

Sebenarnya selain diterima di UNS, Bambang juga diterima di Universitas Diponegoro melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK). Namun, oleh bapaknya, Bambang diarahkan untuk melanjutkan kuliah di UNS.

Meski dibesarkan di keluarga yang relatif berkecukupan dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, Bambang telah terbiasa hidup mandiri tanpa menyusahkan kedua orangtuanya. Sewaktu kuliah, Bambang memperoleh beasiswa dan mampu membiayai pendidikannya sendiri. Bahkan, sebagian uang beasiswanya pun dapat disisihkan untuk keluarganya.

Hingga pada akhirnya Bambang lulus sarjana ekonomi dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun, tepatnya 3 tahun 8 bulan, dengan menyandang predikat *cumlaude* dan lulusan terbaik. Berbekal hal tersebut, salah seorang rekannya menawarkan Bambang menjadi dosen. Namun Bambang memilih untuk mendaftarkan diri pada salah satu bank BUMN di Jakarta. Sehari setelah diwisuda, Bambang langsung bertolak ke Jakarta untuk mengikuti tes rekrutmen pegawai bank kenamaan tersebut.

Setelah melalui serangkaian tes, Bambang dinyatakan lolos sebagai pegawai bank yang saat itu menjadi profesi favorit banyak orang. Mulanya, para pegawai yang baru masuk akan kontrak terlebih dahulu selama dua tahun sebelum kembali mengikuti tes untuk menjadi karyawan tetap. Menginjak tahun kedua masa kerjanya, Bambang justru memilih tidak melanjutkan karier sebagai banker dan mendaftarkan tes penerimaan calon pegawai negeri sipil.

“Di sana kalau masih karyawan kontrak kan memang masih pindah-pindah unit. Saya sebelum berhenti itu posisi sebagai *credit analyst*. Itu memang pekerjaan yang lumayan berat dan bahkan bekerja sampai tengah malam. Ketika menjelang tes karyawan tetap itu saya minta masukan ke banyak orang, ke keluarga, akhirnya memutuskan untuk mendaftar CPNS,” ungkap Bambang.

Bambang meyakini bahwa berkariernya bukan semata-mata soal finansial. Ia memilih untuk mengikuti nasehat keluarganya dengan beralih menjadi abdi negara. Peralihan itu pun tidak selalu mudah, karena dengan adanya perubahan pendapatan membuat dirinya harus memutar otak karena masih harus membantu biaya pengobatan ibunya yang menderita sakit stroke. Ketika bekerja di BPPK yang berkantor pusat di daerah Kebayoran Baru, Bambang selalu menyisihkan gaji bulannya untuk membeli obat-obatan ibunya di daerah Blok M dan mengirimkannya ke Solo.

Cukup lama ibunda Bambang menderita stroke, namun demikian bapaknya pergi lebih dulu. Banyak hal yang ditinggalkan kedua orangtua Bambang, khususnya terkait prinsip hidup. Bambang yang merupakan sulung dari tiga bersaudara, memang diajarkan untuk giat bekerja dan memiliki budi pekerti yang baik agar menjadi contoh bagi adik-adik dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, ibu Bambang selalu menekankan tentang hukum aksi-reaksi. Bahwa apa yang kita kerjakan akan menuai hasil sesuai dengan yang kita upayakan.

“Jadi bermasyarakat itu juga tergantung kita ya, tergantung bagaimana kita melakukan aksi. Kalo aksi kita bagus, pasti reaksinya bagus. Kalo aksi kita kurang bagus, biasanya reaksinya juga kurang bagus. Ibu saya guru agama, jadi selalu mengajarkan soal *attitude*. Kalo *attitude* kita bagus, kembali ke aksi reaksi tadi, yang kita terima insya Allah juga baik,” paparnya.

Hal itu yang selalu Bambang pegang teguh, termasuk saat dirinya ditempatkan

di Ujung Pandang (sekarang Makassar). Awalnya Bambang merasa gundah ketika ditempatkan di luar pulau Jawa, jauh dari keluarga dan sanak saudara. Tapi keyakinan Bambang akan prinsip aksi-reaksi tersebut menguatkan dirinya.

“Dulu masih ada eselon V atau korlak (koordinator pelaksana), saya ditempatkan di Ujung Pandang. Waktu itu saya jadi mikir-mikir gitu kan, kenapa saya pindah dari bank, jadinya ke Ujung Pandang. Tapi ya saya yakin dengan aksi reaksi itu, kalau saya berbuat baik pasti hasilnya baik juga. Ternyata bener di sana dapat temen-temen banyak. Hikmahnya juga saya jadi banyak *networking* sama temen-temen termasuk dari beberapa Pemda, sehingga bisa mengoptimalkan kompetensi dan kapasitas saya,” tambah Bambang.

MENGHARGAI WAKTU DALAM BEKERJA

Bambang merupakan sosok yang dikenal sangat giat bekerja, berintegritas tinggi, dan menghargai hak-hak orang lain. Salah satu yang ia terapkan adalah dengan menghargai waktu dalam bekerja. Bambang selalu datang di waktu-waktu awal bekerja, jarang melaksanakan *work from home* (WFH), dan tidak suka menunda-nunda pekerjaan.

Menurut Bambang, menunda pekerjaan merupakan salah satu pertanda seseorang tidak menghargai waktu dan tidak menghargai orang lain. Sebab, jika kita menunda suatu pekerjaan akan ada hak orang lain yang juga tertunda.

“Atau kalau tidak, ada beban orang lain yang bertambah. Itu kan berarti kita menyusahkan orang lain. Seharusnya prinsipnya seperti itu, bagaimana kita bisa menciptakan *value* di setiap waktu, karena waktu itu tidak dapat diulang,” tegasnya.

Jauh sebelum terdapat fitur “My Task” atau *log book* pada aplikasi Satu Kemenkeu, sejak awal bekerja di Kementerian Keuangan, Bambang sudah menerapkan pencatatan pekerjaan sehari-hari. Bambang selalu membawa buku catatan dan mencatat apa saja yang telah dan akan ia kerjakan. Dengan demikian,



diharapkan tidak akan ada waktu yang terbuang sia-sia.

“Saya kan dulu tinggal di Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Menuju Purnawarman (Jakarta Selatan) itu penuh perjuangan. Jadi kalau sampai kantor, enggak ada nilai tambahnya, bagi saya sendiri tuh rugi. Malamnya saya sudah mencatat, besok yang mau saya kerjakan apa, yang sudah saya kerjakan apa, saya catat di buku itu. Supaya saya bisa memastikan hadir di kantor tuh ada *value*-nya. Waktu kan terus berjalan, jadi kita harus pastikan di setiap waktu itu ada isinya. Kalau enggak ada isinya rugi, karena enggak bisa balik lagi,” tuturnya.

Selain menghargai waktu, Bambang juga sangat menghargai proses berpikir. Menurutnya, *value* dari suatu pekerjaan adalah melalui proses *thinking*, sebab berpikir lah yang membedakan manusia dengan mesin. Untuk itulah harus selalu ada yang dibuat berbeda terus, agar cara berpikir para pegawai terus terasah.

Bahkan, Bambang berpendapat bahwa terkadang masalah itu harus diciptakan, bukan malah dihindari. Hal itu dilakukan agar pegawai dapat naik satu tingkat lebih tinggi, serta dapat terus mengasah pikiran. Jika tidak ada masalah, tambah

dia, manusia akan merasa selalu berada di zona nyaman dan aman.

“Di kerjaan itu saya bilang, meskipun ada SOP-nya, kita harus terus mikir. Kalau enggak mikir, kita fungsinya apa, digantikan saja sama mesin, selesai. Kayak Widyaiswara itu saya dorong untuk bikin kajian. Kalau hanya mengajar itu sudah jadi keseharian mereka, *working* saja. Tapi kalau bikin kajian itu *creative thinking* dan mereka harus belajar lagi (*learning*), sekaligus membangun *relating*. Karena bikin kajian itu enggak mungkin enggak berpikir, enggak mungkin enggak berkomunikasi, enggak mungkin enggak bekerja sama,” paparnya.

Sebelumnya, Bambang juga merupakan salah satu pegawai yang mengawal kampus Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Usai Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang BLU ditelurkan, Bambang mendapatkan mandat untuk menyiapkan dokumen pembentukan BLU tersebut. PKN STAN termasuk yang awal ditetapkan sebagai BLU sehingga tidak ada patok banding dari instansi lainnya.

Bersama dengan tim yang lain, Bambang menyusun dokumen BLU yang masih

“Ibaratnya seperti melihat objek yang tertutup kabut. Merasa jalannya susah, terus enggak jadi dilalui. Padahal ketika didekati, kabutnya hilang, dan objeknya bisa terlihat. Jadi jangan sampai termakan sama persepsi sendiri, dan akhirnya enggak jadi dilakukan.”

-Bambang Juli Istanto

“meraba-raba” wujud dan isinya. Bambang menyebut hal itu tantangan yang luar biasa. Dokumen tersebut tidak lulus pada penilaian pertama, namun Bambang dan segenap tim penyusunnya tidak patah arang. Mereka kembali menyusun dan memperbaiki hingga akhirnya dokumen teknis dan administratif tersebut diterima.

Tantangan lain yang ia alami selama di PKN STAN ketika Bambang mendapatkan penugasan kembali untuk membantu mengawal transformasi PKN STAN. Pada saat itu terdapat kebijakan sentralisasi mahasiswa yang sebelumnya dididik di Balai Diklat di daerah ditarik ke kampus Bintaro. Di sisi lainnya, PKN STAN dituntut untuk melakukan transformasi kelembagaan, proses bisnis, kurikulum, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

Transformasi PKN STAN relatif kompleks, mengingat di satu sisi

harus mengikuti ketentuan dari Kemendikbudristek, di sisi lainnya harus mengikuti ketentuan dari Kementerian Keuangan sebagai organisasi induk PKN STAN. Saat itu, Bambang beserta tim menyiapkan perubahan perangkat kelembagaan seperti statute, organisasi dan tata kerja, serta perangkat lainnya yang diperlukan. Pembahasan perangkat-perangkat tersebut dilakukan secara maraton, yang terkadang dilakukan hingga malam hari.

Salah satu hal yang juga menarik adalah ketika PKN STAN membangun gedung kelas (yang sekarang dikenal sebagai Gedung Nusantara). Pembangunan gedung tersebut melalui proses yang panjang, dimana Bambang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada tahap awal pembangunan, mulai dari perizinan sampai dengan pemilihan penyedia barang dan jasa. “Kalau ibarat drama Korea itu sudah berjilid-jilid, urusan

perizinan dengan Pemda contohnya, saya itu paling anti ngeluarin duit atau ngamplopin. Dan itu enggak mudah, di samping perlu kematangan emosional ya, perlu kompetensi yang lain terutama *networking*. Itu beruntung salah satunya ya karena punya banyak teman. Ketika punya teman banyak, ya banyak juga yang bisa bantu, belum lagi berurusan dengan Aparat Penegak Hukum dan auditor” urainya.

Selain itu, Bambang juga mengawali perubahan ujian seleksi masuk mahasiswa PKN STAN dari *paper-based* dan *computer-based*. Konsekuensi dari perubahan ini adalah penyiapan perangkat komputer di seluruh lokasi tes yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2018, peserta seleksi mahasiswa PKN STAN berjumlah sekitar 140 ribu, dimana proses penyiapannya termasuk proses pengadaannya melalui berbagai kendala.



Apa yang dilakukan Bambang merupakan bagian dari pengabdian dan pelayanannya terhadap bangsa dan negara. Sebab pada marwahnya, fungsi ASN adalah melayani, baik itu kepada masyarakat, para *stakeholders*, dan juga tentunya bangsa dan negara.

Salah satu wujud pelayanan yang dilakukan Bambang ketika menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan adalah dengan meniadakan program Kerja Sama Program Pembelajaran (KSPP), sehingga mampu meningkatkan efisiensi anggaran tanpa harus kehilangan pokok layanan.

“Kita bisa lihat KSPP tidak ada, tapi layanannya tidak jadi berkurang, malah bertambah berkali-kali lipat. Integritas itu memang sesuatu yang mudah sekali diucapkan, tapi sangat berat untuk dilakukan. Tapi begitu bisa dilakukan, integritas itu membawa ketenangan. Untuk hal itu, apresiasi dari mitra itu luar biasa,” ungkapnya.

Di setiap penugasan, Bambang selalu berusaha untuk meninggalkan karya sebagai *legacy* di tempat unit pekerjaan. Sebagai contoh, pada saat penugasan di BDK Malang, Bambang memperbaiki tata kelola yayasan di BDK Malang, dan juga menginisiasi dan memimpin tim untuk membangun mushola dengan anggaran non-APBN. Begitu juga di PKN STAN, dengan terbentuknya BLU dan juga perbaikan infrastruktur dan tata kelola PKN STAN.

HIDUP IKHLAS DAN MENYEDERHANAKAN HIDUP

Sebagai seorang abdi negara yang betul-betul memaknai pengabdian, Bambang juga bekerja dengan ikhlas tanpa pengharapan lebih. Menurutnya, dengan pengabdian bekerja yang tulus membuat dirinya mampu memperoleh *networking* yang luas. Dia pun merasa tak perlu bersusah payah menunjukkan potensi dirinya, karena hal itu akan terbukti dengan sendirinya jika melakukan pekerjaan dengan hati dan kemauan yang tinggi.

“Kita itu kadang-kadang enggak perlu terlalu aktif mem-*branding*. Tapi dengan pekerjaan yang bagus, itu udah otomatis mem-*branding* diri kita, bahkan unit atau organisasi kita, dan itu harus dilakukan secara *continue* dan konsisten, yang dalam banyak hal dapat memudahkan kita dalam menyelesaikan penugasan.,” terangnya.

Bambang juga berpendapat bahwa dalam melakukan pekerjaan, kita harus menghindari berpikir yang negatif terhadap sesuatu. Karena *framing* negatif dalam pemikiran kita justru menghambat dalam melakukan sesuatu, yang mungkin pada kenyataannya tidak seperti yang kita pikirkan.

“Ibaratnya seperti melihat objek yang tertutup kabut. Merasa jalannya susah, terus enggak jadi dilalui. Padahal ketika didekati, kabutnya hilang, dan objeknya bisa terlihat. Jadi jangan sampai termakan sama persepsi sendiri, dan akhirnya enggak jadi dilakukan,” tuturnya.

Oleh karena itulah, hingga saat ini Bambang masih terbilang hidup sederhana karena meminimalisasi ekspektasi namun memaksimalkan pengabdian dirinya. Hal itu pula yang membuat Bambang mampu beradaptasi dengan segala kondisi yang ada. Bahkan dirinya mengaku tidak membedakan gaya hidupnya ketika masih menjadi pelaksana hingga kini memangku jabatan sebagai pimpinan tinggi pratama.

“Dari dulu sampai sekarang makan ya di kantin saja. Dalam hidup ini kita bukan hidup sederhana tapi menyederhanakan hidup. Itu yang penting sebenarnya. Kalau dituruti keinginan kan enggak ada batasnya. Jabatan itu kan titipan dan sarana untuk banyak berbuat kebaikan. Pada akhirnya mandat itu akan ditarik lagi pada waktunya. Jadi dimaksimalkan untuk pengabdian saja dan perbanyak syukur,” ungkap Bambang.

Tentu hal itu tidak dapat dilakukan tanpa *support* dari keluarganya. Beruntung, Bambang memiliki istri dan anak-anak yang selalu mendukungnya. Istri dan ketiga anaknya pun sudah dibiasakan dan dididik untuk hidup sehari-hari secara

sederhana, karena menurutnya situasi seseorang bisa berubah dalam sekejap jika Tuhan menghendaki. Menurut Bambang, hal tersebut sangat penting agar kita bisa beradaptasi dalam situasi dan kondisi apapun.

Untuk itulah, Bambang juga menguasai berbagai keterampilan dasar dalam hidup (*surviving skill*), seperti keterampilan pertukangan, listrik, dan lainnya. Bahkan, Bambang bisa dengan mudah mengetahui kualitas pekerjaan ketika terdapat proyek atau pekerjaan fisik di kantor karena memiliki keterampilan-keterampilan tersebut.

Hal itu diakuinya juga pengaruh yang ditularkan orangtuanya untuk terbiasa bekerja. Agar dirinya mampu mengerjakan sesuatu secara mandiri jika dalam kondisi di mana tidak ada yang bisa mengerjakannya. Namun pada prinsipnya, Bambang meyakini bahwa tidak ada pekerjaan besar yang bisa dilakukan sendirian, pasti ada peran atau bantuan dari orang atau pihak lain.

“Tidak ada prestasi kerja yang kita lakukan sendiri, pasti ada peran orang atau pihak lain di situ. Tidak ada yang namanya *superman*, yang ada adalah *superteam*. Dalam hal membangun kompetensi dan karier, BPPK dapat diibaratkan kolam yang tidak terlalu luas, tapi justru di situlah kita harus dapat memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, kalo tidak ya kita akan tenggelam dalam kolam itu,” ucapnya menyudahi.



Serambi Ilmu

Bambang Kismanto

PESONA PANCASILA
DULU, KINI, DAN NANTI

Suwadi

MASIH ADAKAH OBJEK
PPh PASAL 23 ATAS
DIVIDEN?

Eri Hariyanto

ANALISIS INVESTASI
BERBASIS ESG PADA
PROYEK KERETA API
MAKASSAR-PAREPARE

BAMBANG KISMANTO

WIDYAISWARA AHLI MADYA - PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJERIAL

PESONA PANCASILA DULU, KINI, DAN NANTI

Cikal bakal Pancasila adalah perilaku dan karakter asli bangsa Indonesia. Menurut Profesor Notonagoro, ada tiga unsur yang menjadi asal usul Pancasila yang dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Ketiga unsur tersebut adalah adat istiadat, kebudayaan dan agama (Notonagoro, 1975: 32). Hal tersebut juga didasarkan pada isi pidato Bung Karno, salah satu pengusul rumusan dasar negara. Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia tersebut menyampaikan bahwa rumusan dasar negara yang ia usulkan merupakan hasil dari proses penggalian perilaku bangsa Indonesia secara turun temurun.

Apa yang disampaikan oleh Prof. Notonagoro dan Ir. Soekarno mengenai rumusan dasar negara Pancasila sangat relevan dengan catatan sejarah panjang bangsa Indonesia. Adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat di seantero nusantara memiliki kesamaan. Adat istiadat yang mereka lakukan dan pelihara, merupakan ungkapan hati dan perasaan mereka. Mereka selalu mengaitkan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan dengan kekuatan Sang Maha Pencipta. Perilaku tersebut melahirkan perilaku-perilaku lain seperti saling menghormati dan menghargai sesama mereka, bekerja selalu bersama-sama (gotong royong), dan perilaku-perilaku baik lainnya.

Menurut Agus Sunyoto, Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdhatul Ulama (Lesbumi NU), perilaku masyarakat di nusantara itu saling menghormati dan menghargai. Kebiasaan masyarakat Kerajaan Majapahit (sebagai

contohnya), mereka menganut agama yang berbeda dengan agama yang dianut para punggawa kerajaan, termasuk sang raja. Dan Raja Brawijaya tidak memaksa rakyatnya untuk mengikuti agama yang ia anut. Raja dan para punggawa menganut agama Hindu, sementara rakyatnya mayoritas menganut agama Kapitayan, dan sang raja tidak mempermasalahkannya. Sikap masyarakat pun juga demikian. Mereka menyambut baik setiap ada penyebaran agama baru yang datang kepada mereka. Jika mereka cocok, mereka akan ikut menganut agama tersebut, jika tidak cocok, mereka tidak akan mencegah penyebaran agama tersebut (Sunyoto, 2017). Sifat saling menghargai dan toleransi sudah ada sejak dahulu kala, jauh sebelum kerajaan Majapahit muncul. Sifat tersebut melahirkan kebiasaan baik lainnya.

Kebiasaan-kebiasaan itu antara lain, setiap daerah memiliki kepala suku atau ketua-ketua adat, yang berperan sebagai pemimpin dan penengah ketika ada konflik atau permasalahan di tengah masyarakat. Di setiap tempat ada pertemuan-pertemuan untuk musyawarah mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Budaya menghormati dan menyanggah tercermin pada perilaku yang telah terbentuk turun temurun. Orang tua menyanggah anak muda, yang muda menghormati yang tua, jika dilanggar, mereka meyakini akan ada bencana dan sebagainya.

Bukti-bukti bahwa bangsa Indonesia zaman dahulu memiliki sifat-sifat mulia tersebut dapat dilihat pada relief-relief

yang terdapat di dinding-dinding candi atau prasasti-prasasti. Di Indonesia banyak ditemukan candi dan prasasti tersebut. Dari candi dan prasasti-prasasti itu tergambar adat istiadat yang berlaku di masa lalu.

Adat istiadat tersebut sudah menjadi sistem nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Sistem nilai tersebut dipegang teguh oleh masyarakat secara turun temurun. Ia sudah menjadi budaya yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang masih dikenal sebagai nusantara. Budaya nusantara sudah menjadi sistem nilai bagi bangsa Indonesia.

Menurut Daoed Joesoef budaya adalah sistem nilai yang dihayati. Sementara nilai merupakan suatu yang diyakini baik dan dijadikan standar perilaku oleh sekelompok masyarakat. Sedangkan kebudayaan adalah segala sesuatu yang mencirikan budaya (Joesoef, 1996). Lebih lanjut Daoed Joesoef menyatakan bahwa nilai itu meliputi sesuatu yang berbetuk dan dapat disentuh (tangible), dan sesuatu yang tidak dapat disentuh (intangible). Nilai yang tangible diantaranya adalah bangunan, karya seni dan benda budaya lainnya. Sementara intangible terdiri dari adat istiadat, tradisi, kebiasaan normatif, moral, etika, harga diri dsb (Joesoef, 1996).

Menurut KH. Agus Sunyoto, masyarakat Indonesia memiliki karakter yang baik. Religius, semua aktifitas selalu dikaitkan kepada Tuhan, gotong royong, saling menghargai, suka menolong, solidaritas

tinggi dan sebagainya. Karakter mulia tersebut telah mengantarkan masyarakat Indonesia pada waktu mencapai kejayaannya. Berdirinya kerajaan-kerajaan besar pada abad pertengahan seperti Singasari, Sriwijaya, Majapahit, Demak dan sebagainya menjadi bukti kejayaan tersebut.

Berdasarkan adat istiadat, budaya dan kebiasaan perilaku bangsa Indonesia tersebut, tiga tokoh kemerdekaan merumuskan dasar negara yang hendak didirikan pada tahun 1945. Ketiga tokoh tersebut adalah Moh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Ketiganya menyampaikan usulan masing-masing yang kesemuanya berjumlah 5 poin. Dan yang menarik adalah, ketiganya menyampaikan usulan dengan isi yang hampir sama. Ketiganya selalu menyertakan Ketuhanan, kemanusiaan, gotong royong, musyawarah dan keadilan.

Usulan rumusan tersebut kemudian disepakati oleh panitia 9 dan ditetapkan sebagai dasar negara dengan nama Pancasila. Ini berarti, sumber utama Pancasila yang dijadikan ideologi bangsa dan negara adalah perilaku asli bangsa Indonesia sendiri yang telah berlangsung sejak zaman prasejarah hingga menjelang kemerdekaan. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sudah pasti bisa diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. Sejak diberlakukan secara resmi, Pancasila telah mampu menjadi alat pemersatu bangsa.

Selama kurun waktu yang cukup lama hingga berakhirnya rezim orde baru berakhir, kesatuan dan persatuan bangsa masih bisa dipertahankan. Tidak ada pertikaian berarti yang melibatkan komponen bangsa, baik mengatasnamakan suku, ras maupun agama. Kehidupan masyarakat relatif damai, meski secara ekonomi memang masih belum sesuai harapan.

Fenomena kehidupan yang demikian tersebut tidak terlepas dari usaha-usaha pemerintah yang secara masif melakukan pengenalan dan internalisasi sila-sila Pancasila di tengah-tengah kehidupan

masyarakat. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membekali warga Indonesia sejak dini mengenai Pancasila. PMP menjadi mata pelajaran wajib di sekolah mulai dari tingkat dasar hingga sekolah menengah atas.

Pancasila Kini

Sejak era reformasi bergulir dengan ditandai lengsernya Presiden Soeharta pada tahun 1998, kehidupan berbangsa dan bernegara mulai berubah. Seolah terbebas dari penjara, kehidupan di masyarakat terjadi kebebasan yang melebihi batas. Masing-masing individu merasa memiliki hak mutlak terhadap setiap apa yang mereka inginkan, tanpa memperhatikan batasan atau hak orang lain yang mesti dihargai.

Fenomena pergeseran dalam kehidupan di masyarakat tersebut memicu ketidakstabilan keamanan dan ketidakdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan teknologi informasi yang semakin berkembang dan canggih. Dengan diterbitkannya undang-undang keterbukaan informasi kemudahan masyarakat mengakses internet dan menggunakan berbagai platform media sosial, di satu sisi mempercepat reformasi di bidang informasi, namun di sisi lain dijadikan alat saling serang di antara komponen masyarakat di dunia maya.

Nilai-nilai Pancasila yang dahulu menjadi sistem nilai yang diyakini dan dipegang teguh, kini terlupakan. Alih-alih saling menghargai, masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yang saling menyerang secara verbal di berbagai platform sosial media. Mereka lebih disibukkan dengan mencari kesalahan kelompok yang bersebrangan dengan mereka dan menyebarkannya melalui media sosial. Walhasil, berita-berita bohong berseliweran di dunia internet dan dengan bebas dikonsumsi oleh masyarakat. Pancasila tidak lagi dikenal oleh masyarakat, apalagi dijadikan panduan hidup berbangsa dan bernegara.

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dulu secara masif dikenalkan di masyarakat, kini tidak ada lagi. Lagu Garuda Pancasila yang dulu setiap saat terdengar diputar di berbagai kesempatan, kini tak lagi muncul. Pancasila benar-benar menjadi sesuatu yang asing di telinga dan jiwa masyarakat.

Pancasila, Pesonanya Nanti

Dalam perjalanan sejarahnya, nusantara pernah berjaya dengan berdirinya banyak kerajaan besar dan makmur. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang diakui oleh para arkeolog, abad ke-4 mulai berdiri kerajaan di nusantara. Tercatat dalam sejarah, kerajaan Kutai Martapura di Kalimantan Selatan dan Tarumanegara di wilayah barat pulau Jawa menjadi kerajaan pertama di Indonesia. Setelahnya ada banyak kerajaan yang berdiri. Kerajaan Kalingga, Pajajaran, Kanjuruhan, Mataram Kuno, Singasari, Sriwijaya, Majapahit yang bercorak Hindu Budha hingga kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak sampai Mataram Islam.

Berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut menggambarkan bahwa bangsa Indonesia telah mencapai kemajuan peradaban yang tinggi sejak awal abad masehi. Bahkan bangsa Indonesia lebih maju dan lebih modern jauh melebihi peradaban Eropa yang pada periode yang sama justru mengalami abad kegelapan.

Masa kejayaan peradaban nusantara tersebut tidak terlepas dengan sistem nilai yang mereka pegang secara kuat dan menjadi panduan dalam hidup mereka. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan oleh para arkeolog, bangsa Indonesia berpegang teguh pada nilai-nilai luhur kehidupan. Menurut KH. Agus Sunyoto, bangsa Indonesia adalah bangsa religius, ramah, suka menolong, toleran dan suka bergotong royong. Nilai-nilai tersebut diyakini menuntun bangsa Indonesia pada waktu itu untuk mencapai peradaban yang tinggi sebagaimana disebutkan di awal. Nilai-nilai yang di kemudian hari tepatnya menjelang kemerdekaan dirangkum dalam rumusan Pancasila dan dijadikan

dasar negara Republik Indonesia. Sebuah negara baru dengan kekayaan alamnya yang melimpah.

Dunia telah mengakui bahwa Indonesia adalah negara kaya raya akan sumber daya alam. Kekayaan alamnya terdapat di atas bumi, di dalam bumi maupun di dalam lautan. Sebuah anugerah yang luar biasa besar dari Tuhan. Hanya saja, hingga saat ini, potensi kekayaan yang melimpah tersebut belum mampu mengangkat Indonesia meraih kejayaannya sebagaimana pernah di raih ketika masih berbentuk kerajaan-kerajaan.

Sejarah itu akan berulang. Berkaca bahwa bangsa Indonesia pernah mencapai peradaban yang tinggi dan diakui dunia di masa lalu, di masa mendatang pun prestasi itu akan dapat diraih kembali. Jika mereka mencapai peradaban yang tinggi dengan berpegang teguh pada sistem nilai sebagaimana dipaparkan tadi, kita pun harus melakukan hal yang sama. Bangsa ini harus memegang teguh kembali sistem nilai yang sama, yang di masa kemerdekaan telah dibakukan menjadi ideologi bangsa dan negara dengan nama Pancasila.

Jika nilai-nilai Pancasila itu kembali tertanam di setiap individu bangsa ini, kehidupan tenang dan damai akan mendatangi negeri ini. Ketika kehidupan tenang dan damai, segala kelebihan yang kita miliki akan mampu kita gunakan secara maksimal untuk mencapai kemajuan peradaban sebagaimana masa lalu pernah kita capai. Potensi kecerdasan yang bangsa Indonesia miliki, dipadukan dengan kekayaan alam yang tersedia, Indonesia akan menjelma menjadi negara yang sangat kuat secara ekonomi. Dengan berpegang teguh dengan sistem nilai yang kini telah menjadi ideologi bangsa, Pancasila, maka kita akan mampu membangun kembali peradaban yang tinggi. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi kiblatnya peradaban dunia modern di masa depan. Di masa lalu kita bisa, di masa depan pun juga bisa.

Adalah tugas kita untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam jiwa-jiwa seluruh anak bangsa Indonesia. Berbagai cara mesti kita lakukan. Kita bisa mulai membangun komunitas-komunitas yang bergerak untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik komunitas riil

di masyarakat maupun komunitas virtual melalui media sosial.

Kementerian/Lembaga mulai mencetak penyuluh-penyuluh Pancasila, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk penyuluh-penyuluh antikorupsi untuk mencegah terjadinya korupsi. Memasukkan mata pelatihan tentang Pancasila ke dalam kurikulum pelatihannya. Sangat perlu menghidupkan kembali Pendidikan Moral Pancasila di dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan mulai Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah hingga SMA/ Aliyah sederajat.

Bangsa Indonesia memiliki sejarah besar. Indonesia tidak pernah mengalami masa kegelapan sebagaimana yang dialami oleh bangsa Eropa. Bangsa Indonesia pernah mencapai masa kejayaannya dengan adanya kerajaan-kerajaan besar berdiri di Indonesia. Dengan kembali berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, bukan mustahil kejayaan tersebut akan kembali terulang. Bahkan sangat mungkin Indonesia akan menjelma menjadi negara adidaya mengalahkan negara-negara besar seperti AS dan China.

SUWADI

WIDYAISWARA AHLI MADYA - PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK

MASIH ADAKAH OBJEK PPh PASAL 23 ATAS DIVIDEN?

PENDAHULUAN

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-undang Cipta Kerja) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-undang HPP) terdapat perubahan ketentuan perpajakan terkait penghasilan berupa dividen. Perubahan tersebut terkait cakupan pengertian dividen dan dividen yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (PPh). Pengecualian dividen dari Objek PPh meliputi dividen yang berasal dari dalam negeri dan dividen yang berasal dari luar negeri. Dividen yang dikecualikan tersebut dapat berupa dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan dividen yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri.

Perubahan ketentuan perpajakan terkait dividen tersebut masih menimbulkan pertanyaan oleh beberapa pihak, yaitu apakah masih ada Objek Pemotongan PPh Pasal 23 atas dividen? Artikel ini ditulis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dalam artikel ini akan dibahas pengertian dividen, dividen yang berasal dari dalam negeri yang dikecualikan dari Objek PPh, dan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 atas dividen.

PENGERertian DIVIDEN

Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983¹ sebagaimana telah diubah terakhir dengan (stdtd) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008² (untuk selanjutnya disebut Undang-undang PPh stdtd Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008) memberikan contoh penghasilan berupa dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

1. pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
3. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;³
4. pembagian laba dalam bentuk saham;
5. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
6. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau

diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;

7. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
8. pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
11. pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
12. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Selanjutnya, masih dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g tersebut disebutkan bahwa dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang

¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

² Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

³ Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan dikecualikan sebagai dividen sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal.

demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut di atas tidak mengalami perubahan oleh Undang-undang Cipta Kerja, namun mengalami perubahan oleh Undang-undang HPP yang menghapus pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggota koperasi dari pengertian dividen baik dalam batang tubuh maupun penjelasan Undang-undang HPP. Selain itu, sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi dikecualikan dari Objek PPh dengan perubahan oleh Undang-undang HPP. Perubahan ketentuan tersebut berlaku mulai tahun pajak 2022 karena ketentuan terkait PPh dalam Undang-undang HPP berlaku mulai tahun pajak 2022.

DIVIDEN YANG BERASAL DARI DALAM NEGERI YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPh

Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang PPh sttdt Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan pengecualian dividen yang berasal dari dalam negeri dari Objek PPh yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Ketentuan pengecualian dividen dari Objek PPh tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f tersebut mengalami perubahan oleh Undang-undang Cipta Kerja bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang dikecualikan dari Objek PPh adalah dividen yang diterima atau diperoleh:

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. Wajib Pajak badan dalam negeri.

Undang-undang Cipta Kerja mulai berlaku sejak 2 November 2020. Adapun ketentuan lebih lanjut dari Undang-undang Cipta Kerja mengenai kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi, dan tata cara pengecualian pengenaan PPh diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Adapun PMK yang mengaturnya adalah PMK Nomor 18/PMK.03/2021⁴ tanggal 17 Februari 2021 dan mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2021.

Ketentuan dividen yang berasal dari dalam negeri yang dikecualikan dari Objek PPh sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang PPh setelah perubahan oleh Undang-undang Cipta Kerja tersebut diadopsi oleh Undang-Undang HPP. Namun demikian, kriteria, jangka waktu dividen yang diinvestasikan, serta ketentuan pengecualian pengenaan PPh atas dividen tersebut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Adapun PP yang mengaturnya adalah PP Nomor 55 Tahun 2022⁵ tanggal 20 Desember 2022.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2022 disebutkan bahwa investasi yang berasal dari dalam negeri harus memenuhi kriteria dan jangka waktu tertentu. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (2) PP tersebut diatur bahwa kriteria tersebut dilakukan dalam bentuk investasi yang meliputi:

1. surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;
2. obligasi atau sukuk badan usaha milik negara yang perdagangannya diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

3. obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
4. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
5. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
6. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
8. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
9. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
10. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
11. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
12. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria bentuk investasi untuk dividen yang berasal dari dalam negeri tersebut sama dengan kriteria yang diatur dalam PMK Nomor 18/PMK.03/2021.

Selanjutnya Pasal 11 PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur bahwa jangka waktu tertentu investasi dilakukan dengan ketentuan:

1. paling lambat:
 - a. akhir bulan ketiga setelah tahun pajak diterima atau diperoleh dividen, untuk wajib pajak orang pribadi; atau
 - b. akhir bulan keempat setelah tahun pajak diterima atau diperoleh dividen, untuk wajib pajak badan; dan

⁴ PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

2. paling singkat tiga tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh.

Jangka waktu investasi untuk dividen yang berasal dari dalam negeri tersebut sama dengan jangka waktu yang diatur dalam PMK Nomor 18/PMK.03/2021.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (6) PP Nomor 55 Tahun 2022 disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengecualian Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari dalam negeri diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Sampai dengan artikel ini ditulis, peraturan menteri tersebut belum terbit. Namun demikian, walaupun belum ada peraturan menteri yang mengaturnya, Pasal 71 PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur bahwa pada saat PP Nomor 55 Tahun 2022 mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sttdt Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Dengan demikian, ketentuan tata pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diatur dalam PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tetap masih berlaku.

Selanjutnya, dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 18/PMK.03/2021 disebutkan bahwa dalam hal dividen yang berasal dari dalam negeri diinvestasikan di wilayah NKRI kurang dari jumlah dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Adapun selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 18/PMK.03/2021, dividen yang berasal dari dalam negeri yang

dikecualikan dari objek PPh merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan:

- a. rapat umum pemegang saham; atau
- b. dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Lebih lanjut dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 18/PMK.03/2021 disebutkan bahwa pengecualian dari Objek PPh atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri, dilaksanakan dengan melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang dikecualikan dari objek PPh tersebut tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa Surat Keterangan Bebas.

Berdasarkan Pasal 39 PMK Nomor 18/PMK.03/2021 disebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang tidak memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara pengecualian pengenaan PPh, dan jangka waktu investasi, terutang PPh saat dividen diterima atau diperoleh.

OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS DIVIDEN

Dalam sub pokok bahasan ini dibahas ketentuan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 atas dividen dan Persandingan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 atas dividen dalam tiga era.

1. Ketentuan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 atas Dividen

Pasal 23 ayat (1) Undang-undang PPh sttdt Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

“(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam

bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; ...”

Dari rumusan Pasal 23 ayat (1) tersebut sebetulnya pemotong pajaknya adalah pihak yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dengan demikian, dividen yang menjadi Objek Pemotongan PPh Pasal 23 adalah dividen yang berasal dari dalam negeri dan penerimanya adalah Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Namun demikian, terdapat dividen yang dikecualikan dari Objek Pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) Undang-undang PPh sttdt Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut:

“(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

- ... c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c); ...”

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (4) Undang-undang PPh sttdt Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak mengalami perubahan oleh Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-undang HPP. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang PPh sttdt Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 maupun setelah perubahan oleh Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-undang HPP adalah

dividen yang dikecualikan dari Objek PPh. Dengan demikian, dividen yang dikecualikan dari Objek PPh bukan merupakan Objek Pemotongan PPh Pasal 23.

Selanjutnya, dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang PPh sttdt Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dikenakan pajak bersifat final dengan tarif paling tinggi sebesar 10% dan berdasarkan Pasal 17 ayat (2d) Undang-undang tersebut ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif bersifat final tersebut diatur dengan PP. Hal ini diatur dengan PP Nomor 19 Tahun 2009⁶ dengan tarif sebesar 10%. Oleh karena diatur dengan PP, maka pengenaan PPh bersifat final atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri termasuk dalam lingkup PPh Final Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 23. Ketentuan Pasal 17 ayat (2c) dan ayat (2d) Undang-undang PPh sttdt Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak mengalami perubahan oleh Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-undang HPP.

Berdasarkan pembahasan ketentuan Objek PPh Pasal 23 atas dividen tersebut di atas, jelas bahwa yang menjadi Objek Pemotongan PPh Pasal 23 adalah dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap di Indonesia sepanjang tidak dikecualikan dari Objek PPh dan tidak dikenakan PPh bersifat final.

2. Persandingan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Menurut Undang-undang PPh Sebelum dan Setelah Perubahan oleh Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-undang HPP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya

mengenai cakupan pengertian dividen, dividen yang berasal dari dalam negeri yang dikecualikan dari Objek PPh, dan ketentuan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 atas dividen, maka dapat disandingkan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 atas dividen dalam tiga era sebagaimana tersaji dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Persandingan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 atas Dividen Sebelum dan Setelah

Perubahan oleh Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-undang HPP

Menurut Undang-undang PPh sttdt Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008	Setelah Perubahan oleh Undang-undang Cipta Kerja	Setelah Perubahan oleh Undang-undang HPP
Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap di Indonesia selain dividen yang dikecualikan dari Objek PPh yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, BUMN, BUMD dan koperasi dengan persyaratan tertentu.	Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap di Indonesia yang dibagikan tidak berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau bukan dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ⁷	Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap di Indonesia yang dibagikan tidak berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau bukan dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperjelas Objek Pemotongan PPh Pasal 23 tersebut di berikan contoh berikut ini.

Contoh 1:

Pada tanggal 30 Juni 2020, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, PT ABC membagikan dividen dari cadangan laba ditahan tahun 2019 kepada PT Metalindo sebesar Rp2.000.000.000,00 atas penyertaan modalnya pada PT ABC dengan porsi kepemilikan sebesar 20% dari modal disetor.

Pembagian dividen tersebut merupakan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 karena dividen tersebut merupakan Objek PPh bagi PT Metalindo karena porsi kepemilikannya pada PT ABC kurang dari 25%.

Contoh 2:

Pada tanggal 29 Juni 2021, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, PT KLM membagikan dividen dari cadangan laba ditahan tahun

2020 kepada PT Investindo sebesar Rp3.000.000.000,00 atas penyertaan modalnya pada PT KLM dengan porsi kepemilikan sebesar 22% dari modal disetor.

Pembagian dividen tersebut bukan merupakan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 karena dividen tersebut dikecualikan dari Objek PPh bagi PT Investindo berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang PPh setelah perubahan oleh Undang-undang Cipta Kerja dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor PMK Nomor 18/PMK.03/2021.

Contoh 3:

Pada tanggal 1 Juli 2021 PT DEF membayarkan bunga sebesar Rp2.200.000.000,00 kepada PT Mitra Usaha atas pinjamannya sebesar Rp10.000.000.000,00. Suku bunga kredit yang wajar adalah 10% per tahun sehingga bunga pinjaman yang wajar adalah Rp1.000.000.000,00. PT Mitra Usaha mempunyai penyertaan

⁶ PP Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

⁷ Dividen tersebut tidak termasuk yang dikecualikan dari Objek Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 18/PMK.03/2021.

modal pada PT DEF dengan porsi kepemilikan sebesar 60%.

Selisih pembayaran bunga sebesar Rp1.200.000.000,00 kepada PT Mitra Usaha tersebut termasuk dalam pengertian dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang PPh sttdt Undang-Undang Cipta Kerja karena di atas kewajiban dan terdapat hubungan istimewa antara PT DEF dengan PT Mitra Usaha. Dividen tersebut tidak termasuk yang dikecualikan dari Objek PPh karena dividen yang tidak dibagikan berdasarkan RUPS dan bukan dividen interim. Dengan demikian, dividen sebesar Rp1.200.000.000,00 tersebut merupakan Objek Pemotongan PPh Pasal 23.

Contoh 4:

Pada tanggal 1 Agustus 2022 PT XYZ membeli kembali saham yang telah diterbitkan dari pemegang sahamnya, PT Setia Kawan, dengan harga Rp11.000.000.000,00. Pada saat PT Setia Kawan membeli saham yang diterbitkan oleh PT XYZ, jumlah setoran modalnya sebesar Rp10.000.000.000,00.

Dengan demikian, jumlah sebesar Rp1.000.000.000,0 yang melebihi jumlah setoran modalnya yang

diterima oleh PT Setia Kawan termasuk dalam pengertian dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang PPh sttdt Undang-undang HPP dan tidak termasuk dividen yang dikecualikan dari Objek PPh karena dividen tersebut tidak dibagikan berdasarkan RUPS dan bukan dividen interim. Dengan demikian, dividen sebesar Rp1.000.000.000,00 tersebut merupakan Objek Pemotongan PPh Pasal 23.

SIMPULAN

Dengan diundangkannya Undang-undang Cipta Kerja yang salah satu ketentuannya merubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang PPh, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari Objek PPh. Ketentuan ini diadopsi oleh Undang-Undang HPP. Namun demikian, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja, ketentuan pengecualian pengenaan PPh atas dividen tersebut diatur lebih lanjut dengan PMK, yaitu PMK Nomor 18/PMK.03/2021. Setelah diundangkan Undang-undang HPP, ketentuan pengecualian pengenaan PPh atas dividen tersebut diatur lebih lanjut dengan PP, yaitu PP Nomor 55 Tahun 2022.

Dengan adanya perubahan ketentuan perpajakan terkait dividen oleh Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-undang HPP, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat Objek Pemotongan PPh Pasal 23 atas dividen yaitu dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap di Indonesia selama tidak dikecualikan dari Objek PPh dan tidak dikenakan PPh bersifat final. Ketentuan yang perlu diperhatikan adalah ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 18/PMK.03/2021 yang menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang dikecualikan dari objek PPh merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 71 PP Nomor 55 Tahun 2022, ketentuan ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP Nomor 55 Tahun 2022.

ERI HARIYANTO

WIDYAISWARA AHLI MADYA PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM

ANALISIS INVESTASI BERBASIS ESG PADA PROYEK KERETA API MAKASSAR-PAREPARE

Investasi berkelanjutan atau berbasis ESG saat ini sedang mengalami tren peningkatan. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya rasa tanggung jawab untuk memelihara bumi agar dapat nyaman dihuni secara berkesinambungan. Penurunan kualitas lingkungan yang terjadi saat ini tentu menjadi alasan utama pengembangan investasi berkelanjutan. Pihak yang terlibat dalam investasi ini ingin berperan dalam merawat bumi untuk kehidupan masa depan yang lebih baik.

Beberapa institusi keuangan ternama menginfokan bahwa tren investasi berbasis ESG ini akan terus meningkat. Mandiri Institute mencatat penerbitan obligasi ESG global mencapai US\$930 miliar pada tahun 2021, naik hampir 14 kali lipat dibanding tahun 2014. PWC menginformasikan aset kelolaan yang ditangani para manajer aset secara global diperkirakan naik menjadi US\$33,9 triliun pada tahun 2026, dari US\$18,4 triliun pada 2021.

Dalam mendukung pembangunan dan iklim bisnis berbasis ESG, Pemerintah Indonesia terus mengupayakan perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan oleh PBB sejak tahun 2015. Di sektor bisnis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerapkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) yang merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

PENGERTIAN ESG

Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi, atau bisnis yang berkelanjutan dengan tiga faktor atau kriteria utama, yaitu *environmental* (lingkungan), *social* (sosial), dan *governance* (tata kelola). Korporasi yang menerapkan prinsip ESG dalam praktik bisnis dan investasinya akan turut mengintegrasikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Menurut OJK, ESG merupakan salah satu parameter pelaksanaan pembangunan SDGs (Sustainable Development Goals) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

INVESTASI BERBASIS ESG

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh profit (*investment*) di masa depan.

Investasi berbasis ESG tidak mengejar profit semata. Ada beberapa hal yang menjadi fokus investasi terutama segi kebermanfaatannya bagi lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini yang membuat nilai perusahaan menjadi naik

secara signifikan dalam jangka panjang. Cara lain yang dapat dilakukan dalam berinvestasi berbasis ESG yaitu dengan mengeliminasi perusahaan bersentimen negatif bagi lingkungan maupun sosial, serta tata kelolanya. Kemudian, investor dapat memilih perusahaan-perusahaan yang bernilai positif terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola.

STRATEGI INVESTASI BERBASIS ESG

Investor yang tertarik berinvestasi pada sektor yang berbasis ESG perlu memerhatikan beberapa strategi investasi berikut ini agar investasinya sesuai dengan harapan, terutama dalam memenuhi kriteria ESG. Setidaknya ada 7 strategi yang akan dipaparkan di bawah ini.

1. **Exclusionary**
Exclusionary merupakan strategi utama dalam investasi ESG agar tepat sasaran. Strategi ini menekankan untuk membuat daftar perusahaan-perusahaan yang memiliki sentimen negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat. Misalnya, perusahaan pengeksploitasi sumber daya alam ataupun perusahaan yang mengarah pada perjudian dapat dimasukkan ke dalam daftar ini. Investor dapat mengeliminasi dari opsi penanaman investasi ESG.
2. **Best in Class**
Strategi ini memilih perusahaan yang memiliki peringkat baik dalam

ESG. Dengan strategi ini dapat memisahkan perusahaan yang memiliki dampak baik terhadap lingkungan, reputasi di mata masyarakat, juga kepatuhannya terkait tata kelola maupun aturan pemerintah. Pastikan perusahaan yang dipilih memiliki nilai positif untuk tiap indikator penilaian, bahkan perusahaan tersebut merupakan yang paling unggul untuk ranah bisnis sejenis.

Sebagai contoh, tidak semua perusahaan energi terbarukan layak untuk investasi. Investor perlu melihat indikator lainnya, baik dari sisi lingkungan, sosial maupun tata kelolanya. Kemudian, investor dapat melakukan nominasi dari yang terbaik pada sektor sejenis.

3. ESG Integration

Banyak investor yang memilih strategi ini dalam berinvestasi ESG saat ini. Manajer investasi dalam *ESG integration* akan melakukan analisa aspek-aspek ESG sebuah perusahaan, kemudian dilakukan penyesuaian sebelum mengambil keputusan investasi. Dalam mengintegrasikan faktor-faktor ESG pada sebuah perusahaan, manajer investasi umumnya akan mencoba melakukan penyesuaian taksiran penjualan maupun biaya. Dari penyesuaian tersebut, baru bisa diketahui apakah valuasi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut sesuai dan cukup menjanjikan atau tidak.

4. Sustainability Theme Investment

Strategi ini dapat dilakukan tanpa perlu menyasar berbagai perusahaan dan menilai keseluruhan aspek lingkungan dan sosialnya. Investor hanya perlu menargetkan perusahaan-perusahaan di bidang tertentu yang memiliki sentimen positif terkait lingkungan maupun masyarakat.

Sebagai contoh, investor bisa menargetkan investasi ke perusahaan-perusahaan yang berbasis atau

menelola energi terbarukan. Target investasi bukan hanya keuntungan finansial jangka panjang, melainkan dukungan terhadap perusahaan dalam keberlanjutan lingkungan yang bisa memberi dampak positif pula pada iklim investasi secara menyeluruh.

5. Green Bond

Strategi investasi ESG ini hampir mirip dengan strategi *sustainability theme investment* yang mengarahkan investasi ke perusahaan-perusahaan sejenis yang ramah lingkungan maupun sosial. Perbedaannya hanya bentuk investasi yang dilakukan.

Pada strategi *sustainability theme investment*, investasi ESG dilakukan dengan memberi saham perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek yang dananya akan digunakan untuk operasional perusahaan secara keseluruhan. Sementara, jika memilih strategi *green bond*, investor melakukan pembelian surat utang atau obligasi perusahaan terkait proyek berbasis lingkungan atau sosial yang sedang dilaksanakan.

6. Impact Investment

Strategi ini dilakukan untuk memperoleh perusahaan yang sudah secara nyata berdampak positif pada lingkungan ataupun sosial. Sebagai contoh, investor yang tertarik melakukan investasi ESG pada perusahaan pengelola limbah, harus mengetahui seberapa besar pengaruh pengelolaan perusahaan tersebut ke pengurangan pencemaran air maupun udara. Selanjutnya, investor dapat melakukan investasi ESG pada perusahaan tersebut melalui pembelian surat utang maupun saham.

7. Stewardship and Engagement

Strategi ini secara langsung mengarah pada intervensi berupa pengarahannya dan pengawasan manajer investasi ke perusahaan tempat investor melakukan investasi ESG. Pengawasan dan pengarahannya bertujuan memastikan perusahaan tersebut

menjalankan kegiatan usahanya dengan basis lingkungan, sosial, maupun ketaatan aturan yang tepat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi investor di masa mendatang.

Model ini disebut sebagai strategi *stewardship and engagement* karena pada saat melindungi hak investor dengan pengawasan dan pengarahannya, terjadi interaksi antara manajer investasi dengan manajemen perusahaan. Interaksi yang terjalin antara kedua pihak tersebut tetap berfokus pada aspek ESG.

Ketujuh strategi investasi ESG memang bisa berdiri sendiri-sendiri. Tapi, investor juga bisa mengelaborasi beberapa strategi investasi tersebut untuk mendapatkan perusahaan yang benar-benar baik agar bisa menghasilkan manfaat finansial dan kebermanfaatannya pada masa mendatang.

ANALISIS TERHADAP PROYEK KERETA API MAKASSAR-PAREPARE

1. Sekilas tentang Proyek

Proyek KA Makassar - Parepare (Pembangunan Tahap I lintas barat Sulawesi bagian selatan) merupakan salah satu dari beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Selatan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Proyek ini akan menghubungkan lima kota/kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu Makassar, Maros, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Barru dan Parepare dengan total jarak 142 km dan akan melewati 16 stasiun. Proyek ini akan beroperasi penuh pada tahun 2026.

Keberadaan jalur kereta api ini diharapkan dapat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi Selatan. Pengoperasian kereta api tersebut diharapkan dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja dari pembangunan dan pengoperasian proyek tersebut. Selain itu, moda



Sumber: djkn.kemenkeu.go.id

transportasi kereta api akan mengefisienkan waktu tempuh, baik penumpang maupun logistik. Serta *multiplier effect* terhadap perkembangan UMKM di setiap stasiun dan mengurangi kepadatan lalu lintas darat yang pada gilirannya akan menjaga kualitas jalan lebih lama.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pengelola pengoperasian KA Makassar - Parepare yang telah resmi beroperasi sejak 29 Maret 2023. KAI dalam hal ini membentuk kemitraan bersama PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) dengan nama Konsorsium Kereta Api Sulsel yang bertugas menyelenggarakan kereta api perintis lintas Makassar - Parepare. Penugasan ini berdasarkan penunjukan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian kepada Konsorsium Kereta Api Sulsel melalui Surat Nomor: 153/LLA.KA/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022.

2. Analisis proyek dari sisi Environmental Social and Governance (ESG)

Kegiatan pembangunan kereta api yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur konektivitas transportasi di perkotaan. Kegiatan pembangunan Kereta Trans Sulawesi bertujuan untuk mengembangkan sistem transportasi bersih untuk memenuhi standar desain ketahanan iklim yang lebih tinggi. Indikator utama dampak pembangunan proyek ini yaitu menurunkan emisi GRK sebagai akibat dari pembangunan/ peningkatan sistem transportasi publik yang memindahkan (*shifting*) pengguna moda transportasi lainnya seperti mobil pribadi atau angkutan umum yang menggunakan bahan bakar fosil (BBM). Selain itu kegiatan tersebut memiliki dampak positif lain yaitu untuk mendorong peningkatan pembangunan ekonomi

daerah, meningkatkan konektivitas transportasi, peluang pekerjaan baru, dan mengurangi kemacetan jalan raya.

3. Analisis proyek dari sisi pembiayaan

Pembangunan proyek ini menggunakan skema *creative financing* yang melibatkan sumber pendanaan bukan hanya berasal dari APBN saja, tetapi juga dari sumber lain yang sah seperti kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penugasan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari negara, termasuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Dari sisi pendanaan, investasi untuk pembebasan lahan hingga konstruksi per Februari 2023 mencapai Rp9,2 triliun yang meliputi pembangunan ruas B, C, D dan lintas cabang. Sumber pendanaan dimaksud terdiri dari APBN Rp6,13 triliun, APBD pembebasan lahan Rp84 miliar, Kerja Sama Badan Usaha Pemerintah

(KPBU) Rp1,96 triliun, Sukuk Negara (SBSN) Rp246,6 miliar dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp1,1 triliun (DJKN, 2023).

Pada mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kementerian Keuangan RI memberikan dukungan kepada Kementerian Perhubungan RI melalui fasilitas Project Development Facility (PDF). PT PII ditugaskan sebagai pelaksana fasilitas membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK), serta juga bertindak sebagai penyedia penjaminan pemerintah/*sovereign guarantee*.

Fasilitas Penyiapan Proyek atau Project Development Facility (PDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Tujuannya adalah untuk membantu PJPK menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan (*financial close*).

Pada mekanisme SBSN, Pemerintah menerbitkan SBSN senilai Rp246,6 miliar untuk pembangunan jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar – Parepare Segmen 3 (Makassar – Barru).

4. Analisis proyek dari sisi strategi investasi berbasis ESG

Berdasarkan pemaparan dari Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR, diperoleh informasi bahwa proyek pembangunan KA Makassar - Parepare telah memenuhi kriteria belanja yang memenuhi syarat SDG (*SDGs eligible expenditures*) dengan fokus berdampak hijau (proyek terkait mitigasi dan perubahan iklim) dan

biru dapat dilihat di SDGs Securities Framework.

Berdasarkan SDGs Securities Framework tersebut, proses evaluasi dan pemilihan proyek dilakukan dengan mempertimbangkan dua proses penandaan anggaran (*budget tagging*), yaitu:

- Untuk kegiatan-kegiatan (proyek) dengan belanja yang memenuhi syarat SDG (*SDGs eligible expenditures*) dengan fokus berdampak hijau (proyek terkait mitigasi dan perubahan iklim) dan biru (proyek terkait pesisir dan kelautan), Pemerintah akan memanfaatkan mekanisme Penandaan Anggaran Iklim (*Climate Budget Tagging*) yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga yang terdapat pada sistem KRISNA.
- Untuk kegiatan-kegiatan dengan belanja yang memenuhi syarat SDG (*SDGs eligible expenditures*) dengan fokus berdampak sosial, Pemerintah akan memanfaatkan penandaan belanja terkait SDGs (*SDGs related expenditures*) oleh kementerian/ lembaga di dalam sistem KRISNA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bertugas mengawasi daftar belanja yang layak untuk ditandai untuk SDGs.

Proses penandaan anggaran (*budget tagging*) merupakan proses terpadu yang melibatkan masing-masing kementerian/ lembaga yang bertanggung jawab atas masing-masing proyek serta BAPPENAS dan Kementerian Keuangan. Penandaan ini telah mempertimbangkan dampak-dampak dari kegiatan-kegiatan yang sudah ditandai terhadap aspek perubahan iklim, lingkungan hidup lainnya, sosial, dan ekonomi.

Terkait penerbitan *green* sukuk atau *green bond*, Kementerian Keuangan yang berkoordinasi dengan

BAPPENAS menetapkan daftar kegiatan/proyek yang akan didanai oleh *proceeds* dengan fokus kepada kegiatan yang berdampak hijau hasil dari *climate budget tagging*. Penetapan ini dilakukan melalui sebuah surat keputusan Menteri Keuangan.

Investor yang berinvestasi pada proyek ini dapat menerapkan strategi *Sustainability Theme Investment*, *Green Bond*, dan *Impact Investment*. Melalui 3 strategi tersebut, investor dapat memastikan:

- dukungan perusahaan/proyek tersebut terhadap keberlanjutan lingkungan yang bisa memberi dampak positif pula pada iklim investasi secara menyeluruh;
- surat utang, sukuk (SBSN), atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah/perusahaan dananya akan digunakan untuk pembangunan proyek berbasis lingkungan atau sosial yang sedang dijalankan;
- proyek yang dijalankan memberi pengaruh positif terhadap pengurangan pencemaran lingkungan (termasuk udara).

Dalam beberapa tahun terakhir, tren investor yang memilih instrumen investasi berlandaskan faktor ESG makin berkembang pesat. Di masa mendatang, para investor tersebut dapat secara aktif dalam memengaruhi kebijakan serta praktik perusahaan melalui pertemuan para pemegang saham. Investor dapat mengarahkan perusahaan agar lebih aktif berperan dalam kegiatan yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, kehidupan sosial, dan tata kelola yang lebih baik.

FRITZ OKTA NEHEMNYA

Komunitas Catur Kementerian Keuangan yang *Balance (Work-Life)* dan Sinergis

Dalam kehidupan yang semakin sibuk dan penuh tantangan di Kementerian Keuangan, banyak pegawai mencari cara untuk melepaskan stres dan meningkatkan kreativitas mereka. Salah satu cara yang menarik adalah bergabung dengan komunitas diluar pekerjaan untuk *balancing* dengan pekerjaan. Di dalam organisasi besar Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terdapat beberapa komunitas yang diinisiasi pegawai. Salah satunya adalah komunitas catur yang tengah tumbuh dan berhasil menunjukkan prestasinya. Komunitas ini tidak hanya menjadi tempat berkumpul bagi para pemain catur berbakat dari seluruh unit eselon I di bawah Kemenkeu, tetapi juga sebuah sumber inspirasi yang berpeluang untuk menggabungkan strategi catur dengan dunia keuangan yang kompleks.

Komunitas catur di Kementerian Keuangan mungkin tidak sepopuler di tempat lain, tetapi memiliki latar belakang yang unik. Dimulai pada tahun 2016, sekelompok pegawai bersemangat untuk bertanding untuk merayakan Hari Oeang. Setelah itu, kelompok-kelompok catur antar unit eselon I (UE1) yang semakin aktif untuk bertanding pada *event* HORI tahun-tahun berikutnya. Para pemain mulai berkumpul di waktu luang mereka untuk bermain catur dan berlatih untuk persiapan *event* pada level UE1 masing-masing. Aktivitas ini akhirnya berkembang menjadi sebuah jejaring pemain catur dengan anggota yang memiliki beragam latar belakang. Dari pegawai senior hingga *staf* muda, dari level UE1 sampai Kementerian, komunitas ini menjadi tempat di mana semua orang bisa berbagi kecintaan mereka pada catur.

STRATEGI YANG MEMIKAT BAGI PEGAWAI YANG MAU MEMULAI CATUR

Salah satu hal paling menarik tentang catur adalah strategi yang diperlukan. Ini bukan hanya permainan untuk hiburan semata, tetapi juga sebuah taktik yang memerlukan pemikiran yang mendalam. Dalam dunia keuangan yang sering kali diwarnai oleh ketidakpastian dan perubahan cepat, kemampuan untuk merencanakan beberapa langkah ke depan adalah keterampilan yang sangat berharga.

Anggota komunitas catur di Kementerian Keuangan sering kali menemukan bahwa permainan catur membantu mereka mengembangkan kemampuan analitis yang kuat. Mereka belajar untuk melihat lebih dari satu langkah ke depan, mengidentifikasi risiko dan peluang, dan membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan bukti. Semua keterampilan ini adalah aset berharga dalam dunia keuangan yang serba dinamis.

Tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, komunitas catur di Kementerian Keuangan mengekstraksi pelajaran berharga dari permainan ini. Mereka belajar tentang kesabaran, ketekunan, dan kesiapan untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses. Ketika Anda kalah dalam catur, itu bukan akhir dari segalanya; itu adalah peluang untuk belajar dan tumbuh.

Selain itu, catur mengajarkan pentingnya pemikiran kreatif. Dalam permainan ini, tidak ada satu cara yang benar untuk mencapai tujuan, dan pemain harus berpikir di luar kotak untuk mengalahkan lawan mereka. Ini adalah pelajaran berharga dalam menemukan solusi kreatif untuk tantangan-tantangan yang kompleks di dunia nyata.



KONTINGEN CATUR PADA PORNAS KORPRI 16 TAHUN 2023

Alex Zulkarnain Imanudin-DJBC, Abi Dzar Ghiffari- DJPB, Adhy Margana Rahmatullah-DJP, Hariomurti Tri Kuntonegoro-DJP, Anteng Sefiani-DJKN, Nurul Luthfiah Hasna-DJBC, Nandya Rizky Palupi-DJP, Cessa Seftari-BKF, Rosita Latief-DJP, Talitha Adina Ramadhanty-DJPK, Firman Syah (official)-SETJEN, Sumarsigit (official)-SETJEN, Adityawarman (coach)-DJP

KONTINGEN CATUR KEMENKEU DI TURNAMEN KONTAN CHESS 2023

Ian Martadhinata-DJBC, Rudi Andika-DJPB, Bambang W.-DJP, Panitia, Adityawarman-DJP, Rosita Latief-DJP, Hariomurti-DJP, Dimas Mahardika-DJP

SINERGI BRILIAN UNTUK KEMENKEU DAN DUKUNGAN PIMPINAN

Komunitas catur di Kementerian Keuangan tidak hanya berkumpul untuk bermain catur di waktu luang. Mereka juga mengadakan berbagai turnamen atau pertandingan internal. Turnamen yang sekarang ditunggu oleh para komunitas catur UE1 adalah turnamen dalam rangka HORI 2023. Kegiatan HORI tentu saja akan menciptakan peluang untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang fungsi yang berbeda. Pada kesimpulannya, acara ini tidak hanya meningkatkan keterampilan bermain catur, namun dapat menyeimbangkan pola kerja dan hidup yang berimbang.

Terlepas dari manfaat strategis dan sarana relaksasi yang penting bagi pegawai, dukungan pimpinan dalam keberlangsungan komunitas juga hadir di komunitas ini. Diceritakan oleh Rudy Andika (koordinator catur DJPB), tim catur DJPB mendapatkan fasilitas dan dukungan dana untuk berlatih dan bercengkerama baik secara daring maupun luring. Selain itu, pimpinan juga mendorong pegawainya untuk aktif melakukan olahraga yang secara tidak langsung dapat membuat pegawai lebih bahagia berada di kantor.

Catur memang bukanlah permainan biasa. Catur merupakan perpaduan unik antara seni dan ilmu yang mengandalkan keakuratan berpikir dengan *decision tree* raksasa. Menariknya, komunitas catur yang terkesan *silent* ini dapat menunjukkan sinergi antar UE1 dengan menorehkan prestasi pada Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Ke-16 Tahun 2023 (PORNAS KORPRI). Pada PORNAS KORPRI 2023, komunitas catur berhasil mengukuhkan Kemenkeu pada posisi kedelapan klasemen peroleh medali.

Tim catur berhasil menyumbangkan 3 dari 6 medali yang diperoleh. Medali tersebut terdiri dari dua emas dan satu perak. Tak berhenti di situ saja, pada Agustus 2023, tim catur Kemenkeu juga menjuarai Kontan Chess Championship 2023 yang dihadiri MENPORA dan Ketua MPR-RI.

Komunitas catur di Kementerian Keuangan adalah contoh yang mungkin menginspirasi tentang bagaimana hobi dapat mengubah cara kita berpikir, bekerja, dan hidup. Dalam permainan catur, mereka telah menemukan lebih dari sekadar hiburan; mereka telah menemukan sumber kebijaksanaan dan inspirasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik yang pada akhirnya bermanfaat bagi organisasi.

Kalau anda mau bergabung dengan pemain catur di kantor anda, silakan menemukan komunitas catur yang dikelola UE1 masing-masing pada kontak berikut ini. Dikutip dari seseorang yang tak ingin disebut namanya, catur bukan hanya sebuah permainan, tapi merupakan sebuah perjalanan menuju peningkatan diri.

DJPB	Rudi Andika 0856-4710-7432
DJA	Doharlen Sihotang 0812-7977-1010 Budi Surya 0812-9495-810
BKF	Cessa 0815-5397-0739
DJBC	Rizal Ashari 0896-0486-3538
DJPK	Talitha 0819-0568-1974
DJP	Hario 0857-1068-5241 IG: @pionpamungkas
SETJEN	Firman Syah 0812-8062-264
DJKN	Fatkhul Wahab 0853-4588-6014



MOHAMMAD WINDU DARMAWAN

TAHUKAH KAMU APA ITU LOCAL TAXING POWER?

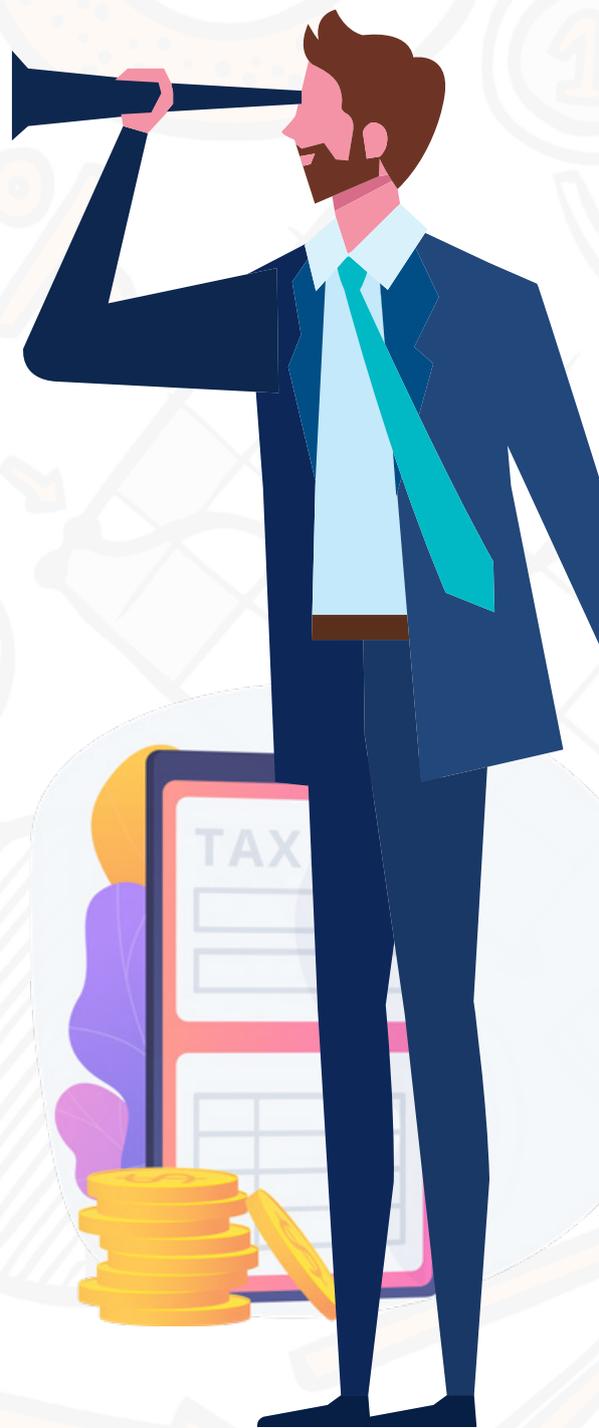
DAN BAGAIMANA CARA UNDANG-UNDANG HKPD MENDORONG LOCAL TAXING POWER DI DAERAH

Local taxing power adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerahnya. Local taxing power bagi pemerintah merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Jika dihubungkan dengan visi pemerataan pembangunan di Indonesia, local taxing power yang memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah masih perlu untuk ditingkatkan secara sistematis dan berkesinambungan saat ini, dimana otonomi daerah telah berjalan selama kurang lebih 24 tahun sejak terbitnya UU no 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Local taxing power merupakan wewenang fiskal pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak dan retribusi yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai layanan dan infrastruktur, seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan taman. Kemudian, Local taxing power juga digunakan pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Dengan memiliki tingkat otonomi yang tinggi dalam mengenakan dan mengumpulkan pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memberikan layanan yang lebih berkualitas.

Jika kita bandingkan dengan negara maju seperti Singapura dan Australia dimana local government atau municipal authority memiliki otonomi yang cukup besar untuk mengenakan dan mengumpulkan pajak dan retribusi seperti pajak rumah tangga, pajak properti, pajak bisnis, serta retribusi seperti parkir, pembuangan sampah hingga pembuangan air, kondisi local taxing power di Indonesia saat ini masih belum optimal karena hingga saat ini hanya sedikit pemerintah daerah yang dapat menghasilkan penerimaan perpajakan yang signifikan dan mampu membiayai pengembangan dan pembangunan daerahnya.

Masih rendahnya local taxing power di sebagian besar daerah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan pajak dan retribusi, kemudian rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi serta kurangnya efektivitas pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau biasa disebut Undang-Undang HKPD yang telah diundangkan pada tanggal 16 September 2022 berusaha memberikan solusi dari permasalahan ini. UU HKPD ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang HKPD ini disusun dengan tujuan untuk memberikan regulasi



yang cukup baik untuk pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Undang-Undang HKPD ini memiliki beberapa langkah untuk mendorong *local taxing power* di Indonesia, yaitu:

Meningkatkan kewenangan daerah dalam menetapkan pajak dan retribusi daerah. Undang-Undang HKPD memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah. Daerah dapat menetapkan pajak dan retribusi daerah yang bersifat wajib dan tidak wajib.

Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian pajak daerah. Undang-Undang HKPD memperkuat pengawasan dan pengendalian pajak daerah. Daerah dapat membentuk lembaga pemungut pajak daerah (LPPD) yang bertugas untuk memungut pajak daerah. LPPD ini akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pajak daerah.

Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang HKPD mendorong daerah untuk mengelola keuangan daerah secara lebih efisien. Daerah dapat membentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang bertugas untuk mengelola keuangan daerah. BPKD ini akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mengelola keuangan daerah secara lebih efisien.

Secara detail, terdapat 102 pasal terkait pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Undang-Undang HKPD yang dapat ditemukan dalam bab II pasal 4 sampai dengan pasal 105. pasal-pasal ini mengatur mulai dari jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dirasionalisasi seperti contohnya retribusi jasa umum yang tadinya terdiri dari 15 jenis menjadi 5 retribusi berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan,

kemudian subjek pajak dan objek pajak yang diperluas dan disesuaikan dengan kebijakan terkini seperti *green policy* yang memberikan insentif kepada pemilik kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan (nonfosil), wajib pajak, tarif-tarif dengan besaran dan skema yang baru yang diharapkan memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih baik kepada pemerintah daerah, hingga dukungan yang lebih optimal terhadap dunia usaha seperti insentif tertentu pada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Jika dibandingkan dengan dasar peraturan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dalam Undang-Undang HKPD terdapat beberapa jenis pajak daerah yang direstrukturisasi dan diintegrasikan seperti pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan untuk kabupaten/kota yang digabungkan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini secara spesifik ditujukan untuk mengurangi proses administratif, *compliance cost* serta optimalisasi pemungutan yang selain meringankan beban birokrasi di sisi beban kerja dan biaya pegawai, juga secara paralel akan meningkatkan kemudahan berusaha bagi masyarakat dan calon investor. Selain itu, terdapat skema opsen, yaitu pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang ditujukan untuk penggantian skema bagi hasil sekaligus *fine tuning* penyesuaian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Skema opsen ini diharapkan akan meningkatkan penerimaan khususnya untuk kabupaten dan kota sekaligus memperluas basis pajak yang akan meningkatkan sustainabilitas penerimaan di masa depan.

Undang-Undang HKPD ini merupakan langkah progresif untuk memperkuat sistem perpajakan di daerah dengan terus mendorong kemudahan berusaha di daerah. Pada akhirnya, disamping mendorong penambahan basis pajak baru melalui sinergi pajak pusat dan daerah, Undang-Undang HKPD memberikan

kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian pajak daerah, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah demi mencapai *local taxing power* yang terus bertumbuh. Saat ini beberapa peraturan turunan dari Undang-Undang HKPD seperti Peraturan Pemerintah baru maupun yang merevisi peraturan lama terus disebut untuk mengejar target implementasi Undang-Undang ini.

Yuk kita kawal implementasi UU HKPD untuk mendorong transformasi *local taxing power* di daerah dan pembangunan Indonesia yang lebih baik.



DIAN NURFAJRIAH

ALUMNI PROGRAM MASTER OF HUMAN RESOURCES AND INDUSTRIAL RELATIONS,
UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA - CHAMPAIGN

Perjalanan Berburu Beasiswa



Masih teringat jelas dalam ingatan saya pada saat acara *sharing session* internal Pusintek bersama para Penerima Beasiswa di bulan Juni 2019 lalu. Di tengah antusiasme para peserta *sharing session* lain yang menceritakan rencana studi mereka, saya dengan yakin menyampaikan cita-cita saya untuk mendampingi suami melanjutkan studi ke luar negeri. Sampai dengan saat itu, melanjutkan studi ke luar negeri memang sama sekali belum masuk dalam rencana hidup saya. Bagi saya, menjalankan peran sebaik-baiknya sebagai pengelola SDM di Pusintek, sekaligus menjalankan peran saya sebagai istri dan ibu dari tiga orang anak sudah lebih dari cukup. Namun, siapa sangka, tepat dua tahun kemudian, di bulan Juni 2021, saya menerima Paspor Dinas perdana saya. Paspor dinas yang pada akhirnya mengantarkan saya melanjutkan studi di Negeri Paman Sam melalui program Beasiswa Pascasarjana Kementerian Keuangan. Sungguh seindah apapun rencana yang telah kita susun, rencana Tuhan akan selalu jauh lebih indah dari yang diharapkan.

Pada awal bulan Oktober 2019, saya membuka diskusi bersama suami tentang keresahan saya dalam menjalankan peran saya sebagai pengelola SDM Pusintek. Meskipun saya telah bertugas selama enam tahun di bidang pengelolaan SDM, saya merasa *knowledge* dan pengalaman kerja yang saya miliki masih jauh dari memadai untuk menjawab permasalahan pengelolaan SDM saat ini. Saya merasa ada *gap knowledge* karena saya tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang pengelolaan SDM, sehingga muncul keinginan saya untuk lebih mendalami ilmu dan *best practice* pengelolaan SDM melalui tugas belajar.

Alhamdulillah, keluarga saya mendukung penuh rencana saya. Sejak saat itu, kami mulai membahas berbagai rencana ke depannya, mulai dari kampus dan negara tujuan yang akan saya pilih, program beasiswa apa yang akan saya perjuangkan, *timeline* persiapan *hunting* beasiswa, dan tentunya kemungkinan cuti

di luar tanggungan negara yang harus suami saya ambil ketika kebersamaian saya menjalankan studi. Saya percaya bahwa mendapatkan restu dari keluarga dan menganalisis *cost and benefit* jika mengambil beasiswa adalah hal terpenting yang harus kita lakukan sebelum memulai perburuan mencari beasiswa.

Setelah memastikan restu suami dan mendiskusikan *cost and benefit* jika melanjutkan studi melalui program beasiswa, saya menghubungi beberapa teman saya yang telah mendapatkan beasiswa sebelumnya. Saya menggali alasan mereka mengikuti program beasiswa, persiapan apa yang mereka lakukan, hal-hal apa yang perlu menjadi perhatian saya, dan meminta asistensi mereka dalam perjalanan saya berburu beasiswa nanti. Memiliki mentor sekaligus *buddy* yang berpengalaman sangat berguna, tidak hanya sebagai *resource person*, tetapi juga sebagai *support system* yang menjaga semangat saya dalam menghadapi setiap tahapan seleksi beasiswa. Jika pepatah mengatakan bahwa “pengalaman adalah guru terbaik”, maka saya menjadikan “pengalaman orang lain” sebagai guru terbaik dan *shortcut* saya dalam mempersiapkan diri.

Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tanpa menunggu lama, pada tanggal 15 November 2019, BPPK mengumumkan Seleksi Program Beasiswa Pascasarjana Kementerian Keuangan (FETA). Saya melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mengakselerasi dan menguji niat saya dalam melanjutkan studi. Setelah memastikan bahwa saya mendapatkan izin atasan untuk mendaftar seleksi beasiswa ini, saya mulai mengatur waktu bekerja dan mengalokasikan waktu istirahat saya untuk belajar persiapan seleksi beasiswa. Pada saat itu, saya memantapkan hati untuk tidak hanya sekedar mencoba, tetapi saya harus memberikan *effort* terbaik dalam mengikuti setiap tahapan seleksi. Karena ini pengalaman pertama saya dalam mencari beasiswa, saya memanfaatkan waktu jeda antara pengumuman kelulusan setiap tahapan dengan persiapan tahapan seleksi berikutnya. Pada prinsipnya, saya ingin memastikan bahwa jika pada akhirnya saya gugur dalam tahapan seleksi, hal itu bukan karena saya belum maksimal dalam mempersiapkan diri, tetapi karena memang para kandidat lain lebih *qualified* untuk mendapatkan beasiswa. *Alhamdulillah*, setelah proses seleksi yang sempat terhenti karena



pandemi, pada tanggal 22 Desember 2020 saya dinyatakan lolos Seleksi Program Beasiswa Pascasarjana Kementerian Keuangan tahun 2020 (FETA VI).

ANXIETY, ADAPTASI, DAN ALIANSI

Setelah melalui berbagai proses pendaftaran, *alhamdulillah* pada tanggal 28 April 2021, saya menerima *Letter of Acceptance* (LoA) pada program studi *Master of Human Resources and Industrial Relations*, University of Illinois Urbana – Champaign, Amerika Serikat (MHRIR, UIUC). Saat itu saya masih mengikuti program pembekalan persiapan keberangkatan (*predeparture training*) yang diselenggarakan oleh BPPK secara daring. Awalnya sempat muncul berbagai kekhawatiran karena kemampuan bahasa inggris saya yang masih kurang, dan kesempatan untuk berdiskusi lebih banyak tentang pencarian LoA dan persiapan tugas belajar dengan sesama *awardee* menjadi terbatas karena *predeparture training* ini dilakukan secara *daring*. Namun *alhamdulillah*, pada akhirnya justru saya dan satu orang lainnya menjadi karyawan pertama yang berangkat ke kampus impian kami masing-masing dari program beasiswa FETA VI saat itu.

Dalam menjalani pendidikan di negara asing, tentunya terdapat berbagai tantangan yang mewarnai hari-hari saya. *Anxiety* atau rasa cemas berlebih, sering kali menghampiri saya di berbagai situasi. Mulai dari pertama kali saya menginjakkan kaki di *Chicago O'hare International Airport* pada tanggal 8 Agustus 2021, minggu-minggu awal semester, bahkan setiap kali akan presentasi atau ujian semester, tak jarang muncul keraguan pada diri sendiri, apakah saya dan keluarga saya akan mampu bertahan dengan lingkungan, budaya, dan bahasa yang sepenuhnya baru ini. Tetapi pada akhirnya, *alhamdulillah*, saya dan keluarga saya berhasil melaluinya dengan *support system* yang luar biasa.

Support system pertama yang saya miliki tentunya adalah keluarga inti. Sejak awal proses seleksi hingga selesai menempuh pendidikan, mereka selalu menjadi motivasi terbesar saya untuk berusaha maksimal dalam setiap hal yang saya lakukan. Ada masanya ketika saya merasa proses adaptasi yang saya lalui terlalu berat, saya ingat bahwa ada suami dan ketiga anak saya yang juga sedang mengalami proses yang sama. Keberadaan mereka di dekat saya menjadi penguat

tersendiri yang membuat perjalanan studi saya semakin menyenangkan.

Support system selanjutnya adalah para keluarga baru dari Indonesia yang saya temui disana. Jauh sebelum berangkat ke negara atau kampus tujuan, sangat dianjurkan bagi para karyasiswa untuk menghubungi mahasiswa Indonesia yang sedang menjalankan studi di sana atau diaspora Indonesia yang sudah menetap di kota tujuan kita. Hal ini sangat penting untuk memberikan kita gambaran seperti tentang bagaimana lingkungan di sana, referensi tempat tinggal, termasuk rekomendasi transportasi untuk menuju kota tersebut, sehingga memudahkan saya dan keluarga dalam mempersiapkan diri dan menjalani hari-hari. Saya bersyukur dapat bertemu dengan mereka yang terasa seperti keluarga. Informasi tentang mahasiswa atau diaspora ini dapat diperoleh dari berbagai komunitas masyarakat atau pelajar Indonesia di Amerika Serikat, seperti Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (PERMIAS), Ikatan Keluarga Alumni STAN (Ikanas) chapter US-Canada, atau komunitas-komunitas lainnya.

Selanjutnya, *support system* yang tidak kalah penting juga saya dapatkan dari





universitas dan rekan kuliah. UIUC memiliki berbagai program untuk membantu mahasiswanya beradaptasi dan belajar di kampusnya, seperti mentoring dan konseling akademik, kelas menulis akademik, *mental health support*, dan *English as Second Language class* jika kemampuan Bahasa Inggris kita masih dirasa kurang. Di fakultas saya, *School of Labor and Employment Relations*, terdapat *Buddy System*, dimana seorang mahasiswa senior akan ditugaskan untuk kebersamaan satu atau dua mahasiswa baru selama masa beradaptasi, bahkan sejak mahasiswa baru tersebut belum berangkat ke Amerika Serikat. Selain itu, sebelum memilih mata kuliah yang akan diambil, kami berkonsultasi dengan *student advisor* untuk memastikan bahwa mata kuliah yang akan diambil memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sehingga kami dapat lulus sesuai dengan waktu dan *knowledge* yang ditargetkan. Para profesor di kampus juga sangat terbuka untuk berdiskusi tentang perkuliahan. Jika terdapat materi perkuliahan yang belum saya pahami, saya memanfaatkan *office hour* profesor untuk bertanya lebih jauh di luar jadwal perkuliahan.

Dari sisi rekan kuliah, saya bersyukur

dapat berteman dengan rekan-rekan dari berbagai negara yang sangat suportif dalam membantu saya belajar dan beradaptasi. Saya ingat salah satu pengajar saat *predeparture training* pernah menyinggung tentang pentingnya memiliki *alliance* teman-teman kuliah yang pintar dan suportif agar kita bisa lebih memahami materi kuliah. Awalnya, saya sempat ragu apakah saya akan bisa memiliki *alliance* ketika kuliah nanti. *Alhamdulillah*, berawal dari mata kuliah *Quantitative Methods* di semester I, saya bisa menjadi lebih dekat dengan beberapa teman *native* yang kesulitan dengan mata kuliah ini. Saat itu saya membantu mereka belajar setiap pekan, sehingga selain pertemanan kami lebih akrab, kemampuan Bahasa Inggris saya juga makin terasah. Pada akhirnya, teman-teman saya ini juga tidak segan membantu saya di mata kuliah lain jika saya mengalami kesulitan. Menurut saya, memanfaatkan keunggulan kompetitif kita untuk membantu orang lain adalah mata uang yang berlaku dimana-mana untuk membuka relasi dan aliansi.

Terakhir yang tidak kalah penting dari proses adaptasi ini adalah saya terus belajar untuk lebih mengenali diri dan mengatur waktu. Dengan mengenali

kekuatan dan kelemahan saya, saya merasa lebih mudah dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan dan perkuliahan. Sebagai contoh, saya menyadari bahwa saya mengalami kesulitan memahami penjelasan profesor yang kadang terlalu cepat. Untuk mengatasinya, sebelum perkuliahan dimulai, saya mempelajari materi yang akan diajarkan dan mencari *current issue* melalui internet sebagai pengayaan. Saya juga berusaha aktif bertanya atau menjawab pertanyaan di kelas untuk menguji pemahaman saya. Manajemen waktu yang baik juga sangat diperlukan karena saya harus menjalankan peran saya sebagai mahasiswa, istri, ibu, dan anggota *course management team* salah satu mata kuliah di kampus, serta berbagai peran lain yang saya ambil. Saya merasa bahwa dengan tugas belajar ini, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab atas berbagai amanah dan peran yang saya miliki. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui program beasiswa pascasarjana Kementerian Keuangan ini. Dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya adalah salah satu wujud syukur yang bisa saya lakukan.



RAHMAT NUGROHO

Mengoptimalkan Keamanan Digital: Prinsip ISO 27001 dalam Mengelola Kata Sandi dengan Bijak



Di era digital yang semakin canggih ini, menjaga keamanan data pribadi dan informasi sensitif telah menjadi suatu keharusan. Salah satu langkah kunci dalam menjaga keamanan secara online adalah dengan menjaga kata sandi dengan cermat. Kata sandi merupakan kunci akses yang melindungi informasi pribadi, akun, dan data penting dari potensi ancaman seperti peretasan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan. Kehilangan kendali atas kata sandi dapat membuka pintu bagi kita untuk mengakses informasi sensitif, mengakibatkan dampak yang merugikan secara finansial maupun pribadi.

Tidak hanya itu, kebiasaan buruk dalam pengelolaan kata sandi juga dapat berdampak negatif pada skala yang lebih luas, terutama jika kita menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun. Ini memberikan peluang bagi peretas untuk mengakses berbagai layanan dan platform yang kita gunakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa setiap akun memerlukan kata sandi yang unik dan kuat guna mengurangi risiko kebocoran data. Dengan menjaga kata sandi dengan baik, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga integritas keseluruhan ekosistem digital.

Ketika kita berbicara tentang pentingnya menjaga kata sandi, tidak hanya soal ancaman eksternal, tetapi juga tentang menjaga kualitas dan keberlanjutan hidup digital kita sendiri. Penggunaan kata sandi yang lemah atau terlupakan bisa mengakibatkan kerugian waktu dan usaha dalam mengatur ulang akun yang terkunci. Dengan merawat kata sandi secara baik, kita memastikan bahwa pengalaman online kita tetap lancar dan produktif. Oleh karena itu, mari kita berinvestasi dalam praktik keamanan yang baik, seperti menggunakan kombinasi

karakter yang kompleks, mengganti kata sandi secara berkala, dan mengaktifkan fitur verifikasi dua faktor, adalah langkah penting dalam membangun kehadiran digital yang aman dan andal.

Salah satu cara yang dapat kita lakukan dalam mengelola kata sandi adalah merujuk pada ISO 27001. ISO 27001 merupakan standar internasional untuk manajemen keamanan informasi yang memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola dan melindungi informasi yang penting bagi suatu organisasi. Salah satu aspek yang diatur dalam ISO 27001 adalah pengelolaan keamanan kata sandi. ISO 27001 menekankan pentingnya menjaga keamanan kata sandi sebagai bagian integral dari strategi keamanan informasi. Mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip ISO 27001, standar internasional keamanan informasi, bisa membantu kita mengelola kata sandi dengan lebih efektif.

Prinsip 1: Kata Sandi yang Kuat

Prinsip ini mirip dengan mengunci pintu rumah kita. Kita harus menciptakan kata sandi yang kuat untuk menghalangi akses yang tidak sah ke akun-akun kita. Hindari kata sandi sederhana seperti "123456" atau nama hewan peliharaan kita. Cobalah kombinasi karakter yang beragam seperti huruf besar dan kecil, angka, dan simbol khusus. Contohnya, kata sandi "D0mb@L0ver\$2099!" lebih kuat daripada yang sederhana.

Prinsip 2: Manajemen Risiko dan Kata Sandi Unik

Setiap akun memiliki nilai dan risiko yang berbeda. Menggunakan kata sandi yang sama di semua akun seperti menggunakan kunci yang sama untuk semua pintu rumah kita. Jika seseorang mendapatkan kuncinya, mereka bisa membuka semua pintu. Sebaiknya gunakan kata sandi unik untuk setiap akun, seperti "iniEm@ilP@ss01!" untuk email dan "iniSocialM3d14!01" untuk media sosial. Ini membantu mengamankan akun lain jika salah satu terancam.

Prinsip 3: Siklus Perbaharuan Kata Sandi yang Terencana

Kita sering kali melupakan bahwa kata sandi perlu diganti secara berkala. Bayangkan kalau kunci pintu rumah kita tidak pernah diganti, tentu saja risikonya lebih tinggi. ISO 27001 menganjurkan kita untuk mengganti kata sandi setiap beberapa bulan sekali. Misalnya, "iniEm@ilP@ss01!" bisa menjadi "iniEm@ilP@ss02!" setelah beberapa bulan.

Prinsip 4: Otentikasi Dua Faktor (2FA)

Prinsip ini seperti mengaktifkan pengaman ekstra di pintu rumah kita. Selain kunci, kita juga menggunakan kartu akses atau sidik jari untuk membuka pintu. Begitu juga dengan akun online kita. Aktifkan fitur otentikasi dua faktor (2FA) jika tersedia. Setelah memasukkan kata sandi, kita juga akan diminta memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui pesan teks atau aplikasi khusus.

Prinsip 5: Hindari Informasi Pribadi dalam Kata Sandi

Seringkali kita menggunakan tanggal lahir atau nama orang terdekat sebagai kata sandi. Ini seperti meletakkan kunci cadangan di dekat pintu rumah. Prinsip ISO 27001 mengingatkan kita untuk tidak menggunakan informasi pribadi dalam kata sandi. Cobalah kata sandi seperti "Bat4W@rn4?M3r@h!" yang tidak ada hubungannya dengan informasi pribadi.

Prinsip 6: Pengawasan Aktivitas dan Manajer Kata Sandi

Prinsip ini seperti memiliki kamera pengawas di depan pintu rumah kita. Kita harus memeriksa aktivitas akun kita secara rutin. Jika ada hal mencurigakan, kita bisa mengambil tindakan segera. Selain itu, penggunaan manajer kata sandi juga membantu. Ini adalah alat yang aman untuk menyimpan kata sandi kita. Kita hanya perlu mengingat satu kata sandi utama untuk mengakses semua kata sandi yang disimpan di dalamnya.

Best Practice Lainnya:

Jaga Kerahasiaan Kata Sandi: Jangan pernah berbagi kata sandi dengan siapa pun, bahkan teman dekat atau keluarga. Kata sandi adalah kunci rahasia kita untuk melindungi informasi.

Hindari Kata Sandi Generik: Menggunakan kata sandi seperti "password", "welcome", "admin", "123456" dan sejenisnya. Gunakan kombinasi yang unik dan tak terduga.

Periksa Tautan Sebelum Masuk: Jika mendapat email atau tautan yang mengarah ke login, pastikan itu benar-benar dari layanan yang bersangkutan. Jangan mudah terkecoh oleh phishing.

Log Out Setelah Selesai: Setelah selesai menggunakan akun online, pastikan untuk keluar (log out). Ini mencegah akses yang tidak sah jika perangkat kita hilang.

Pembaruan Keamanan: Pastikan sistem operasi dan perangkat lunak terbaru diinstal. Pembaruan sering kali memperbaiki celah keamanan.

Gunakan Sandi yang Panjang: Sandi yang lebih panjang cenderung lebih sulit ditebak. Cobalah membuat frasa rahasia yang hanya kita yang tahu.

Tanda-Tanda Kata sandi Lemah dan Dampaknya:

Mudah Ditebak: Jika kata sandi Kita terdiri dari kata-kata umum atau urutan angka sederhana, ini membuatnya mudah ditebak oleh penyerang.

Tidak Mengandung Variasi: Jika kata sandi Kita hanya terdiri dari satu jenis karakter, seperti hanya huruf kecil atau hanya angka, kekuatan keamanannya berkurang.

Tidak Cukup Panjang: Kata sandi yang terlalu pendek memiliki risiko yang lebih tinggi untuk disusupi karena lebih mudah untuk ditebak.

Menggunakan Informasi Pribadi: Jika kata sandi Kita berhubungan dengan informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, atau nama hewan peliharaan, itu dapat dengan mudah ditebak oleh penyerang.

Menggunakan Kata-kata Umum: Kata-kata seperti “password,” “admin,” atau “123456” adalah kata-kata umum yang paling sering digunakan dan harus dihindari.

Jika kata sandi kita lemah, dampaknya bisa sangat merugikan. Penyerang dapat dengan mudah masuk ke akun kita, mengakses informasi pribadi, atau bahkan mencuri identitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mematuhi prinsip-prinsip ISO 27001 dalam mengelola kata sandi. Dengan mengikuti praktik keamanan yang baik, Kita dapat menjaga informasi tetap aman dan terhindar dari risiko cyber.

Cara Mengukur Kekuatan Password:

Panjang Kata Sandi: Semakin panjang, semakin baik. Minimal 12 karakter diimbangi dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.

Kombinasi Karakter: Gabungkan berbagai jenis karakter dalam kata sandi, seperti huruf, angka, simbol, dan spasi jika diperbolehkan.



Tidak Menggunakan Kata-kata

Umum: Jangan gunakan kata-kata umum atau yang mudah ditebak, seperti “password” atau “123456”.

Tidak Menggunakan Informasi

Pribadi: Jangan gunakan nama, tanggal lahir, atau informasi pribadi lainnya yang mudah ditebak.

Tidak Menggunakan Pola Sederhana:

Hindari pola berurutan seperti “abcdefg” atau repetisi seperti “111111”.

Cara Kita Merasa: Coba baca kata sandi yang Kita buat. Apakah itu terdengar seperti frasa yang masuk akal atau hanya kumpulan karakter acak?

Pengujian Online: Terdapat situs online yang dapat mengukur kekuatan kata sandi kita. Cobalah salah satunya untuk melihat seberapa kuat kata sandi yang kita buat.

Terdapat beberapa sumber online yang dapat kita gunakan untuk mengukur kekuatan kata sandi. Berikut adalah beberapa di antaranya:

Kaspersky Password Checker:

Kaspersky, perusahaan keamanan siber terkemuka, memiliki fitur online yang memungkinkan kita memeriksa kekuatan kata sandi. Cukup masukkan kata sandi yang ingin dicek, kemudian akan muncul penilaian kekuatan kata sandinya.

How Secure Is My Password: Situs web ini memberikan perkiraan berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi penyerang untuk membobol kata sandi dengan kekuatan komputasi saat ini.

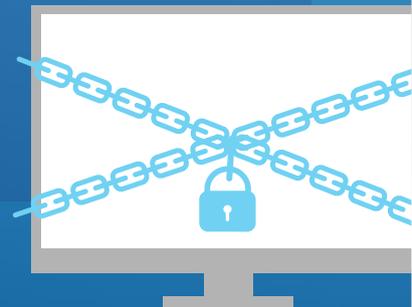
Password Meter: Password Meter adalah situs online yang dapat membantu Kita mengevaluasi kekuatan kata sandi berdasarkan beberapa faktor, seperti panjang, variasi karakter, dan lainnya.

Google Password Manager: Jika kita menggunakan Google Chrome, pengelola kata sandi bawaan Google dapat memberikan umpan balik tentang kekuatan kata sandi saat membuat atau memasukkan kata sandi. Ini adalah fitur yang dapat membantu kita untuk mengukur kekuatan kata sandi saat itu juga.

Aplikasi Manajer Kata Sandi: Banyak aplikasi manajer kata sandi memiliki fitur untuk mengukur kekuatan kata sandi yang kita buat. Contohnya adalah LastPass, 1Password, Bitwarden, dan sebagainya.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip dan best practice ini, serta menggunakan kriteria di atas untuk mengukur kekuatan kata sandi, kita dapat menjaga informasi pribadi dan akun online kita tetap aman dari ancaman dunia digital. Ingatlah bahwa keamanan online adalah tanggung jawab bersama, dan langkah-langkah kecil ini dapat membuat perbedaan besar dalam melindungi data dan privasi. Jadi, mari kita ciptakan lingkungan digital yang aman dan terlindungi dengan mengelola kata sandi dengan bijak.

Terakhir namun tak kalah pentingnya, selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk melindungi kita dalam setiap langkah di dunia digital ini. Kombinasikan prinsip-prinsip keamanan dengan keyakinan spiritual, dengan begitu setidaknya kita sudah berusaha untuk memiliki fondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan keamanan dalam dunia digital yang terus berkembang.



MUHAMMAD FATH KATHIN

Toxic Positivity: Apa dan Bagaimana Cara Mengatasinya

Setiap orang pasti pernah berada dalam lingkungan yang penuh dengan tekanan, baik itu dalam lingkungan pekerjaan, keluarga, maupun yang lainnya. Untuk selalu mempertahankan sikap positif dalam lingkungan yang demikian, kita acap kali mendapat pesan-pesan yang mendorong untuk selalu memandang segala sesuatu dari sisi terbaiknya, bersyukur, dan merasakan kebahagiaan. Namun, tidak selamanya penekanan terhadap sikap positif itu berujung kepada kebaikan.

Sebaliknya, penekanan berlebihan pada sikap positif dan ketidakmampuan untuk mengakui perasaan negatif dapat menghasilkan apa yang telah diidentifikasi Wood (2019) sebagai “*toxic positivity*”. Apa itu *toxic positivity*? Kita akan mengupas lebih dalam konsep *toxic positivity* dan cara untuk mengatasi dampak negatifnya pada psikologis.

Apa Itu Toxic Positivity?

Toxic positivity, yang dapat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk selalu berusaha untuk mempertahankan perasaan positif dan bahagia, bahkan dalam menghadapi situasi yang penuh tantangan atau emosi yang sulit, telah menjadi subjek perhatian dalam literatur psikologi (Lomas, et al., 2021). Dalam praktiknya, *toxic positivity* sering kali menyebabkan individu merasa terdorong untuk menekan atau meremehkan perasaan negatif mereka, seolah-olah perasaan tersebut tidak boleh ada (Lin, 2020). Penelitian empiris telah menunjukkan bahwa penekanan berlebihan pada pemikiran positif dapat menghasilkan ketidakpuasan diri yang lebih tinggi dan ketidakbahagiaan (Wood, Perunovic, & Lee, 2009). Fenomena ini dapat dijumpai dalam berbagai aspek

kehidupan, termasuk dalam konteks pekerjaan, hubungan interpersonal, dan perasaan individu terhadap diri mereka sendiri.

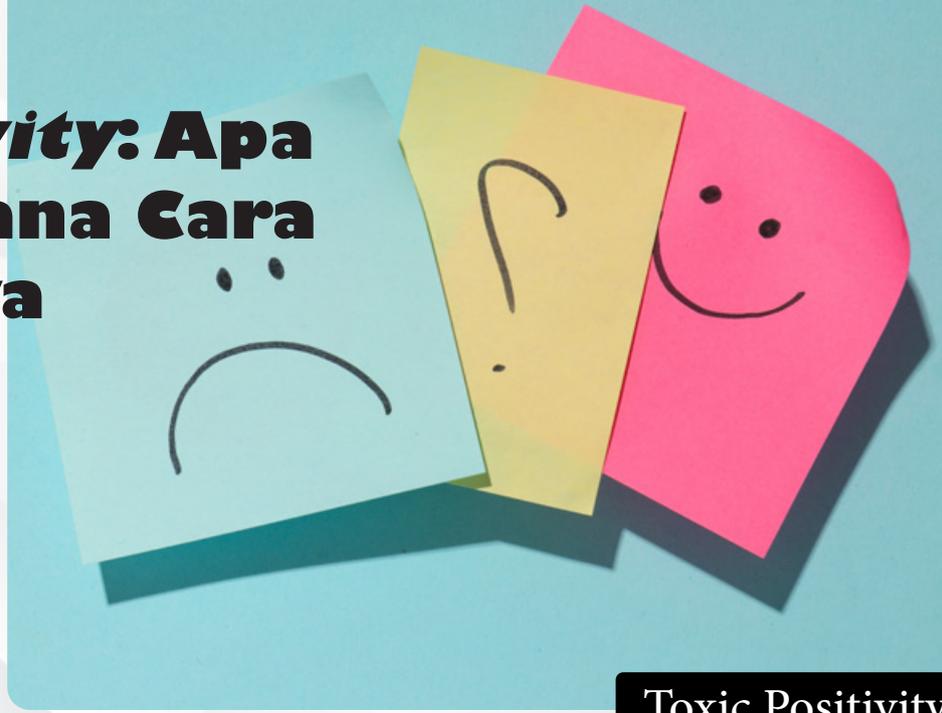
Dampak Toxic Positivity

Keseimbangan psikologis dan emosional seseorang dapat terganggu oleh efek yang merugikan dari *toxic positivity*. Berikut adalah beberapa dampak *toxic positivity* pada kesejahteraan psikologis dan emosional seseorang:

Penekanan emosi yang umumnya terjadi akibat *toxic positivity* bisa berdampak serius pada kesejahteraan psikologis seseorang. Ketika individu merasa terpaksa untuk mengabaikan atau menekan emosi negatif mereka, ini bisa mengakibatkan penumpukan stres dan ketidaknyamanan emosional (Nelson, et al., 2020). Dalam jangka pendek, hal ini mungkin tampak sebagai cara efektif untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menjaga citra diri yang selalu positif. Namun, dalam jangka panjang, penumpukan emosi ini dapat memiliki dampak yang merugikan. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa penekanan terhadap emosi negatif dapat berkontribusi pada

masalah seperti depresi, kecemasan, dan peningkatan tingkat stres kronis (Kashdan & Rottenberg, 2010). Selain itu, ketika emosi negatif ditekan terus-menerus, hal ini dapat mempengaruhi kualitas tidur, mengganggu pola makan, dan bahkan mengarah pada perilaku hidup yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan obat. Oleh karena itu, penekanan emosi negatif, yang sering kali merupakan ciri dari *toxic positivity*, tidak hanya memiliki dampak negatif pada aspek-aspek emosional, tetapi juga dapat memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental individu dalam jangka panjang.

Tidak autentik adalah salah satu dampak yang sering terjadi ketika seseorang terjebak dalam budaya *toxic positivity*. Ketika individu merasa harus selalu menunjukkan sikap positif dan bahagia tanpa memedulikan perasaan sebenarnya, hal ini dapat menciptakan perasaan ketidakautentikan. Mereka mungkin merasa terpaksa untuk memainkan peran yang tidak sesuai dengan perasaan sebenarnya, yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk menjadi diri mereka sendiri.



Toxic Positivity

Penelitian psikologi menunjukkan bahwa ketidakautentikan dapat menyebabkan ketidakcocokan internal, yang artinya individu merasa tidak sesuai dengan diri mereka sendiri (Ryan & Deci, 2017). Mereka mungkin merasa bahwa mereka harus berpura-pura atau menyembunyikan perasaan mereka agar diterima oleh orang lain atau sesuai dengan harapan sosial. Hal ini dapat menghasilkan stres emosional dan konflik internal yang signifikan. Selain itu, ketidakautentikan juga dapat merugikan hubungan interpersonal. Ketika orang berinteraksi dengan seseorang yang terus-menerus berpura-pura bahagia, mereka mungkin merasa bahwa hubungan tersebut tidak mendalam atau tidak jujur. Ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan dan kedalaman dalam hubungan tersebut.

Menghormati dan menerima perasaan yang beragam, termasuk perasaan negatif, adalah langkah penting untuk memastikan bahwa individu merasa diterima dan dapat menjadi diri mereka sendiri tanpa perlu berpura-pura atau menyembunyikan perasaan mereka. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan jujur baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja.

Cara Mengatasi Toxic Positivity

Setelah kita mengenali dampak dari *toxic positivity*, berikut adalah beberapa langkah untuk mengatasinya:

Mengenali dan mengatasi *toxic positivity* memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perasaan kita dan cara menghadapinya. Salah satu langkah pertama yang krusial adalah **mengenali emosi** kita. Dengan mengenali emosi kita sendiri, berarti memberikan diri kita izin untuk merasakan berbagai macam emosi, termasuk yang negatif seperti marah, sedih, stres, atau cemas.

Salah satu aspek yang perlu dicatat adalah bahwa emosi adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Setiap orang memiliki emosi, dan semua emosi itu sah.



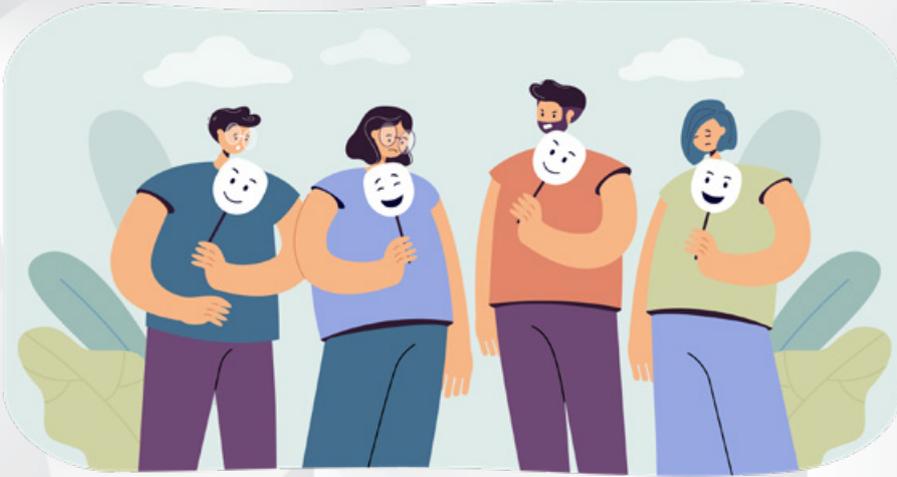
Menerima bahwa kita memiliki hak untuk merasakan perasaan ini adalah langkah pertama yang penting dalam mengatasi *toxic positivity*.

Pada dasarnya, menekan emosi negatif atau mencoba untuk menyembunyikannya hanya akan menghasilkan akumulasi tekanan emosional yang tidak sehat. Penelitian dalam jurnal "*Emotion*" menunjukkan bahwa penekanan emosi negatif dapat mengarah pada peningkatan stres dan perasaan distres yang lebih tinggi (Gross & Levenson, 1993). Ini berarti bahwa semakin kita mencoba untuk menekan emosi negatif, semakin kuat emosi tersebut muncul di kemudian hari.

Mengembangkan kecerdasan emosional adalah langkah penting dalam mengatasi *toxic positivity* dan memastikan keseimbangan emosional yang sehat. Kecerdasan emosional melibatkan pemahaman yang mendalam tentang perasaan sendiri, serta kemampuan untuk mengelola dan merespons emosi dengan bijak.

Salah satu aspek kunci dalam mengembangkan kecerdasan emosional adalah **self-awareness** atau kesadaran diri. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengenali perasaan dengan jelas. Dengan menjadi lebih sadar akan perasaan, kita dapat lebih baik memahami apa yang memicu emosi kita, serta bagaimana emosi tersebut memengaruhi pemikiran dan tindakan kita.

Selain itu, kecerdasan emosional juga melibatkan **self-regulation** atau regulasi diri. Ini berarti memiliki kemampuan untuk mengelola emosi dengan bijak. Ketika kita merasa emosi negatif, seperti marah atau sedih, datang, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk meredakan atau mengalihkannya. Misalnya, kita bisa mencoba teknik relaksasi, meditasi, atau olahraga untuk mengatasi emosi tersebut.



Selanjutnya, berbicara dengan orang lain juga memungkinkan kita untuk mendapatkan **perspektif dari sudut pandang yang berbeda**. Orang lain mungkin memiliki pengalaman atau pemahaman yang dapat membantu kita melihat situasi dengan lebih jelas. Mereka dapat memberikan wawasan yang berharga atau bahkan menawarkan solusi yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya.

Selain itu, berbicara dengan orang lain adalah cara yang efektif untuk membangun **dukungan sosial**. Ketika kita berbagi perasaan dengan orang-orang yang peduli tentang kita, kita akan menguatkan ikatan sosial dan akan merasa *di-support*. Ini adalah elemen penting dalam menjaga kesejahteraan psikologis.

Dalam konteks pekerjaan, berbicara dengan rekan kerja atau atasan yang dapat dipercaya juga dapat membantu dalam mengatasi tekanan untuk selalu mempertahankan sikap positif. Diskusi terbuka tentang tantangan yang kita hadapi di tempat kerja dapat membantu kita untuk selalu merasa didukung dan dapat memberikan solusi yang bermanfaat.

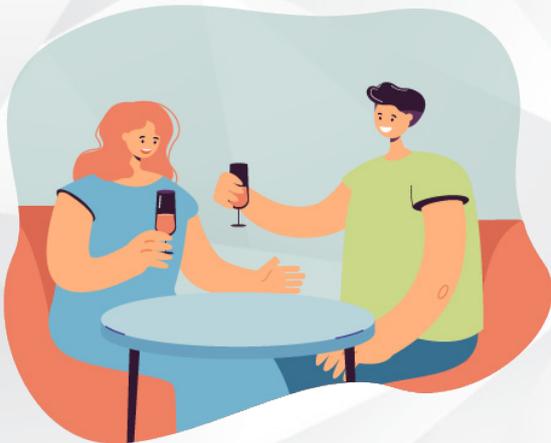
Kesimpulan

Toxic positivity dapat memiliki dampak negatif pada kesejahteraan emosional dan psikologis kita. Mengenali, menerima, dan mengatasi perasaan negatif adalah langkah-langkah penting dalam mengatasi tekanan ini. Dengan demikian, kita dapat menjadi lebih autentik, lebih sadar, dan lebih seimbang dalam mencapai kebahagiaan dan mengatasi kesulitan dalam hidup kita. Selain itu, pendidikan dan pemahaman tentang masalah ini dapat membantu kita semua untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan peduli terhadap perasaan orang lain. Selamat mencoba!

Terakhir, kecerdasan emosional juga melibatkan **empati** terhadap diri sendiri. Ini berarti memberi diri kita dukungan dan pengertian yang sama seperti yang kita berikan kepada orang lain ketika mereka mengalami emosi sulit. Sering kali, kita cenderung lebih keras pada diri sendiri daripada pada orang lain. Dengan mengembangkan empati terhadap diri sendiri, kita dapat mengurangi tekanan untuk selalu merasa positif dan bahagia.

Dengan mengembangkan kecerdasan emosional, kita akan lebih mampu mengatasi *toxic positivity*. Kita akan menjadi lebih sadar akan perasaan kita, lebih mampu mengelolanya dengan bijak, dan lebih autentik dalam pendekatan kita terhadap emosi. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju keseimbangan emosional yang lebih sehat dan memastikan bahwa kita dapat mengatasi berbagai aspek kehidupan dengan lebih baik.

Berbicara dengan orang lain adalah salah satu langkah yang sangat penting dalam mengatasi *toxic positivity* dan memastikan keseimbangan emosional yang sehat. Ketika kita berbicara dengan seseorang yang kita percayai, seperti teman, anggota keluarga, atau seorang terapis, kita memberi diri kita kesempatan untuk **mengekspresikan perasaan kita dengan aman**. Ini adalah tempat di mana kita dapat berbicara terbuka tentang emosi kita tanpa takut akan penilaian atau kritik yang negatif. Ini sangat penting karena merahasiakan perasaan negatif atau terus menekannya hanya akan memperburuk *toxic positivity*.





KHOTIMATUS SA'DIYAH

Memilih *Sunscreen* yang Tepat untuk Si Buah Hati

Paparan sinar matahari yang berlebihan dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan kulit, terutama pada anak-anak. Kulit anak-anak lebih sensitif terhadap sinar UV berbahaya, yang dapat meningkatkan risiko *sunburn*, kerusakan kulit jangka panjang, bahkan peningkatan risiko kanker kulit. Bahkan, menurut *Skin Cancer Foundation*, meskipun cuaca mendung atau berawan, aplikasi *sunscreen* tetap dianjurkan karena kulit masih dapat menyerap sebagian besar sinar UVA dan UVB. Untuk itu, penting bagi para orang tua untuk memilih *sunscreen* yang tepat untuk melindungi si buah hati dari paparan sinar matahari yang berbahaya.

Mengapa *Sunscreen* Penting untuk Anak-anak?

Kulit anak-anak lebih tipis dan belum berkembang dibandingkan dengan kulit orang dewasa. Ini membuatnya lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar UV. Meskipun matahari memberikan manfaat vitamin D yang penting, paparan berlebihan dapat menyebabkan masalah kulit yang serius. Oleh karena itu, penggunaan *sunscreen* yang tepat menjadi langkah yang sangat penting.

Namun, memilih *sunscreen* untuk anak-anak tidak boleh sembarangan. Beberapa kriteria perlu diperhatikan agar perlindungan kulit si buah hati efektif dan aman.

Kriteria Penting dalam Memilih *Sunscreen* untuk Anak-anak

1. Pilih Besaran SPF yang Tepat

Pilih *sunscreen* dengan SPF yang tepat untuk perlindungan si kecil, sebaiknya pilih yang memiliki SPF 30 tapi jangan lebih dari 50. SPF adalah singkatan dari "*Sun Protection Factor*," dan semakin tinggi angka SPF, semakin baik perlindungan dari sinar UVB. Sinar UVB adalah penyebab utama terbakarnya kulit. Sebuah studi epidemiologi yang dilakukan oleh Wang et al. pada tahun 2013 menunjukkan bahwa anak-anak yang menggunakan *sunscreen* dengan SPF 30 atau lebih tinggi memiliki risiko yang lebih rendah untuk terkena *sunburn* dibandingkan dengan mereka yang menggunakan SPF di bawah 30. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan SPF yang tepat dapat secara signifikan mengurangi risiko terbakarnya kulit anak-anak saat terpapar sinar matahari.

Sebagai informasi, Sinar UVB adalah jenis sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan kulit terbakar. SPF mengukur kemampuan *sunscreen* untuk melindungi kulit dari sinar UVB. Menurut American Academy of Dermatology, SPF 30 melindungi kulit dari sekitar 97% sinar UVB, sementara SPF 50 melindungi kulit dari sekitar 98% sinar UVB. Data ini menunjukkan bahwa semakin tinggi SPF yang digunakan, semakin efektif *sunscreen* dalam mencegah terbakarnya kulit.

2. Broad-Spectrum Protection

Pastikan *sunscreen* yang Anda pilih memberikan perlindungan spektrum luas, artinya melindungi dari sinar UVA dan UVB. Sinar UVA dapat merusak kolagen kulit dan menyebabkan peningkatan kerutan, hiperpigmentasi, dan hilangnya elastisitas kulit. Paparan berulang terhadap sinar UVA dapat meningkatkan risiko kanker kulit, termasuk melanoma. Sedangkan sinar UVB adalah penyebab utama terbakarnya kulit dan peningkatan risiko kanker kulit non-melanoma. Oleh karena itu, perlindungan terhadap sinar UVB juga sangat penting.

3. Water-Resistant

Anak-anak sering terlibat dalam aktivitas yang melibatkan air seperti berenang di kolam renang, bermain di pantai, atau berlari-lari berpeluh. Selain itu, mereka juga sering menghapus atau menggosok kulit mereka dengan handuk. *Sunscreen* tahan air dapat memberikan perlindungan yang lebih tahan lama saat terpapar air atau gesekan. Beberapa penelitian klinis telah menunjukkan bahwa *sunscreen* yang tahan air mampu menjaga efektivitas perlindungan lebih baik daripada *sunscreen* biasa saat kulit terkena air atau aktivitas yang menghasilkan keringat. Hal ini penting untuk menghindari perlindungan kulit yang berkurang akibat air atau keringat.

Namun, penting untuk diingat, meskipun *sunscreen* tahan air lebih tahan lama, sangat disarankan untuk mengaplikasikan ulang *sunscreen* setelah berenang atau beraktivitas yang melibatkan air. Re-aplikasi atau pengaplikasian ulang adalah kunci untuk menjaga perlindungan kulit yang efektif.

4. Hypoallergenic

Hypoallergenic adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan produk yang dirancang untuk mengurangi risiko timbulnya alergi atau iritasi pada kulit. Produk yang dianggap hypoallergenic telah melewati pengujian klinis untuk memastikan bahwa mereka kurang mungkin menyebabkan reaksi alergi. Pada umumnya, dokter kulit (dermatolog) merekomendasikan produk hypoallergenic untuk anak-anak, terutama jika anak memiliki riwayat kulit sensitif atau masalah alergi.

Dengan memilih *sunscreen* yang diuji sebagai hypoallergenic, kita dapat merasa lebih yakin bahwa kita memberikan perlindungan kulit yang aman dan nyaman bagi si buah hati. Ini juga membantu mengurangi ketidaknyamanan yang mungkin timbul karena reaksi kulit yang tidak diinginkan.

Kulit anak-anak umumnya lebih sensitif. Pilih *sunscreen* yang telah diuji sebagai hypoallergenic, yang akan mengurangi risiko reaksi alergi atau iritasi kulit.

5. Bebas dari Bahan Kimia Berbahaya

Kulit anak-anak cenderung lebih sensitif, dan sistem kekebalan tubuh mereka masih berkembang. Oleh karena itu, penggunaan *sunscreen* yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat meningkatkan risiko iritasi atau reaksi alergi pada kulit mereka. Sejumlah studi toksikologi telah mengidentifikasi potensi risiko kesehatan dari beberapa bahan kimia yang digunakan dalam *sunscreen*. Misalnya, *oxybenzone* adalah bahan kimia yang umum ditemukan dalam *sunscreen* dan telah dikaitkan dengan gangguan hormon serta masalah kesehatan lainnya ketika digunakan secara berlebihan. Bahan kimia tertentu, seperti *oxybenzone* dan *octinoxate*, dapat lebih mungkin menyebabkan iritasi pada kulit sensitif, termasuk kulit anak-anak.

Sebaliknya, bahan aktif mineral seperti *zinc oxide* atau *titanium dioxide* adalah alternatif yang lebih aman, karena mereka bekerja sebagai penghalang fisik dan cenderung kurang menyebabkan iritasi. Penghalang fisik, dalam konteks perlindungan kulit dari sinar matahari, mengacu pada jenis *sunscreen* atau tabir surya yang bekerja dengan cara menciptakan lapisan fisik di atas kulit untuk melindungi dari sinar matahari. Lapisan fisik ini berfungsi sebagai “penghalang” atau “pelindung” fisik yang menghalangi sinar matahari untuk meresap ke dalam kulit.

Cara Menggunakan Sunscreen dengan Benar

Selain memilih *sunscreen* yang tepat, penting juga untuk menggunakannya dengan benar. Berikut beberapa cara untuk menggunakan *sunscreen* yang tepat:

Oleskan *sunscreen* secara merata ke seluruh kulit yang terpapar sinar matahari, termasuk wajah, leher, lengan, dan kaki.

Oleskan *sunscreen* setidaknya 15 menit sebelum berjemur di bawah sinar matahari.

Aplikasikan ulang setiap dua jam, atau lebih sering jika anak berenang atau berkeringat.

Gunakan pelindung tambahan seperti topi, pakaian yang menutupi tubuh, dan kacamata hitam untuk melengkapi perlindungan dari sinar matahari.

Memilih *sunscreen* yang tepat untuk si buah hati adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan kulit anak-anak. Dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang disebutkan di atas, Anda dapat memberikan perlindungan yang efektif dan aman dari sinar UV berbahaya. Ingatlah bahwa pemilihan *sunscreen* yang tepat dan penggunaan yang benar akan membantu melindungi kulit anak-anak dari risiko kerusakan kulit jangka panjang dan penyakit yang berhubungan dengan paparan sinar matahari.

Semoga bermanfaat!

FRITZ OKA NEHEMYA

Resensi Buku

Good Business: Bisnis Sebagai Jalan Kebahagiaan



Judul Buku (Indonesia) :

Good Business: Bisnis Sebagai Jalan Kebahagiaan

Judul Buku (Inggris) :

The Good Business: Leadership, Flow, and The Making of Meaning

Penulis Buku :

Prof. Mihaly Csikszentmihalyi

Peresensi :

Fritz Oka Nehemya

A-Z



Resensi buku kali ini dipicu salah satu koleksi yang tersedia secara *hard book* di Perpustakaan Kementerian Keuangan. Bagi pegawai pecinta *self upskilling*, Perpustakaan kita memiliki banyak koleksi yang dapat dibaca secara fisik maupun digital. Oleh karena itu, buruan cek sosmednya supaya bisa lebih cepat dan gampang belajar mandiri.

Buku ini saya pilih karena diawali oleh diskusi hangat tentang konsep kebahagiaan di Bagian SDM KI – Sekretariat Badan (BPPK). Kala itu diskusi ditutup dengan simpulan singkat bahwa untuk bahagia diperlukan *meaning* untuk melakukan sesuatu. Menurut saya, buku ini dapat menjelaskan bagaimana cara menemukan *meaning* tersebut. Secara umum, alurnya sangat logis dan isinya bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan profesional kita.

Prof. Mihaly Csikszentmihalyi merupakan *Hungarian-American psychologist*. Pada masa kecilnya, beliau sempat putus sekolah dan bekerja membantu orang tua. Uniknyanya, sebelum menjadi ahli psikologi terkemuka, ia terpukau dengan penjelasan Carl Jung (seorang *Swiss Psichiatri* dan *Psychoanalyst*) tentang psikologi penampakan UFO. Singkat cerita, kekaguman beliau pada topik UFO mendorongnya bermigrasi ke Amerika Serikat pada usia 22 tahun untuk belajar psikologi dan lulus sarjana satu dari Universitas Chicago di tahun 1959.

“Good Business: Bisnis Sebagai Jalan Kebahagiaan” membawa konsep *flow* (aliran) ke dalam dunia bisnis/kerja, menyoroti bagaimana prinsip-prinsip yang mendasari aliran dapat diterapkan dalam konteks bisnis dan pekerjaan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang berkelanjutan. *Flow* berarti sebagai sebuah pengalaman psikologis yang mendalam di mana seseorang sepenuhnya terlibat dalam suatu aktivitas. Dalam keadaan ini, seseorang merasa sangat fokus pada tugas yang sedang dijalani, hingga pada tingkat di mana waktu tampak berlalu begitu cepat, dan semua perasaan seperti kebahagiaan,

keterlibatan, dan pencapaian dirasakan secara intens. (*Detail dari konsep ini dapat dibaca pada best-selling book yang berjudul Flow: The Psychology of Optimal Experience*)

Bab awal buku ini membeberkan latar belakang tentang pergeseran makna profesi. Pada zaman Firaun, profesi dilakukan oleh budak dan sekarang ini profesi bergeser menjadi salah satu kekuatan sentral kehidupan kontemporer. Profesi atau pekerjaan menjelma sebagai hal yang dapat memberikan **makna** dan **tujuan** bagi individu dalam bermasyarakat.

Sebagai hasil riset ilmiah, buku ini menyajikan berbagai studi kasus dan wawancara dengan pemimpin bisnis sukses yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip aliran ke dalam operasi perusahaan mereka. Csikszentmihalyi menunjukkan bahwa kebahagiaan dalam bisnis tidak hanya terkait dengan profit, tetapi juga dengan pengalaman positif pegawai, kepuasan pelanggan, dan dampak positif terhadap masyarakat.

Salah satu poin utama dalam buku ini adalah bahwa aliran dapat dicapai dalam pekerjaan atau bisnis ketika individu merasa terlibat sepenuhnya dalam pekerjaan mereka, memiliki tujuan yang jelas, dan merasa tantangan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Csikszentmihalyi juga menekankan pentingnya etika dalam bisnis, menunjukkan bahwa bisnis yang berfokus pada keuntungan semata tidak akan membawa kebahagiaan jangka panjang. Konsep ini lazim kita kenal dengan prinsip *triple bottom line: people, planet, profit*.

Dalam “Good Business,” pembaca akan menemukan berbagai strategi praktis untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung aliran, termasuk bagaimana memotivasi pegawai, membangun budaya perusahaan yang positif, dan mengukur kesuksesan dengan lebih dari sekadar angka-angka keuangan. Dengan demikian bacaan ini sangat bermanfaat bagi para pemimpin organisasi, pengusaha, dan siapa pun yang tertarik untuk

menjalankan entitas dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kebahagiaan.

Salah satu hal teknis yang disajikan pada buku ini adalah kombinasi antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan tantangan. Kesimbangan optimal pada kedua elemen tersebut dinyatakan sebagai kondisi *flow*. Terlampaui tinggi kompetensi individu akan mendatangkan kebosanan dalam pekerjaan yang tidak menantang. Apabila terlalu tinggi tantangannya juga akan membuat stres seseorang yang memiliki kompetensi yang jauh lebih rendah.

Secara keseluruhan, “Good Business: Bisnis Sebagai Jalan Kebahagiaan” adalah buku yang menginspirasi dan informatif, mengajak kita untuk mempertimbangkan ulang arti kesuksesan dalam bisnis dan bagaimana kita dapat mencapai kebahagiaan melalui kerja keras yang bermakna dan beretika.

Sekilas konsep *flow* merupakan konstruk yang mirip dengan *engagement* yang akhir-akhir ini cukup sering terdengar di organisasi kita, Kementerian Keuangan. Dengan membaca buku tersebut, mungkin kita dapat membedakan lebih lanjut perbedaan keduanya dari sisi definisi, konteks, durasi, dan fokus. Ayo kita pinjam bukunya di Perpustakaan Kementerian Keuangan.

Demikianlah resensi mengenai buku “Good Business: Bisnis Sebagai Jalan Kebahagiaan”. Semoga pembaca tertarik untuk membaca dan mencoba untuk menciptakan *flow* pada aspek kehidupan. Terima kasih.



UNGGUL KUSALAWAN RESPATIADI DAN ANIEK JULIARINI

Menjelajah Kuliner dalam Balutan Budaya dan Tradisi Yogyakarta Istimewa

... Pulang ke kotamu

Ada setangkup haru dalam rindu

Masih seperti dulu

Tiap sudut menyapaku bersahabat,

penuh selaksa makna

Terhanyut aku akan nostalgia

Saat kita sering luangkan waktu

Nikmati Bersama

Suasana Jogja ...

Para pencinta musik generasi 90-an pasti tidak asing dengan sepenggal bait lagu ini. Syair indah gubahan KLA Project ini menjadi salah satu gita ikonik yang menggambarkan kehangatan kota Yogyakarta dan mendeskripsikan setting sebuah kota yang eksotis dengan segala keindahan, keunikan dan keramahannya.

Banyak julukan yang disematkan pada kota Yogyakarta, atau orang terbiasa menyebutnya dengan Jogja. Selain dikenal sebagai kota pelajar, Jogja juga merupakan kota budaya serta kota wisata dengan tradisi kental yang masih terjaga. Selain itu Jogja juga dikenal sebagai kota kuliner dengan segudang makanan khas yang rasanya nikmat dan pastinya dengan harga terjangkau. Kuliner Jogja tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menggambarkan sejarah, identitas, dan keragaman budaya masyarakatnya.

Bagi konco pemelajar yang pernah datang ke Yogyakarta, pasti setuju bahwa Jogja adalah surganya makanan lezat. Di tengah perkembangan dan gempuran kompetitif kuliner modern, Jogja tetap dapat mempertahankan kelezatan makanan tradisionalnya. Bakpia, gudeg, jadah, bakmi jawa, sate klathak, tengkleng, pecel, angkringan, wedang ronde, ayam goreng, bersanding manis dan serasi dengan Tugu Jogja, Malioboro, keraton, candi, Kaliurang, dan berbagai destinasi indah lainnya. Yuk, kita kenali beberapa makanan tradisional yang terkenal diantaranya adalah gudeg, sate klathak, dan bakpia.

1. Gudeg merupakan makanan ikonik Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan dan bumbu rempah-rempah yang khas. Gudeg dimakan bersama nasi dengan lauk pelengkap ayam, telur, tahu, tempe, dan sambal goreng krecek. Sesuai dengan salah satu sebutannya sebagai kota gudeg, cukup banyak berbagai destinasi tempat yang direkomendasikan untuk mencoba kuliner ini, antara lain: Gudeg Yu Djum Wijilan, Gudeg Permata Bu Narti, Gudeg Sagan, Gudeg Batas Kota, dan lain-lain.



GUDEG BESEK

Sumber: https://www.carikulinerindonesia.com/#gudeg-yu-djum-wijilan-slasar-malioboro-stand-slasar-malioboro_wX2WuvOgXfyNbBv9xzB1A.html



2. Sate klathak terbuat dari daging ayam atau sapi yang ditusuk dengan besi seperti jeruji sepeda, kemudian dibakar dengan arang. Sate klathak memiliki rasa unik karena dimakan dengan nasi dan kuah kacang. Beberapa warung sate klathak legendaris yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke Yogyakarta antara lain: Sate Klathak Pak Pong, Sate Klathak Pak Bari, Sate Klathak Kang Dayat, dan Sate Kambing Pak Syamsuri.



SATE KLATHAK

3. Bakpia adalah kue kering berisi kacang hijau atau kacang merah yang menjadi oleh-oleh khas Yogyakarta. Terdapat berbagai varian rasa, seperti cokelat, keju, durian, ubi ungu, dan sebagainya. Beberapa pilihan bakpia yang sering dijadikan buah tangan ketika wisatawan datang ke Jogja, antara lain: bakpia Pathok 25, Bakpia Pathok 75, Bakpia Tugu Jogja, dan Bakpia Kurnia Sari.



SUMBER: DOKUMENTASI UMKM BINAAN BDK YOGYAKARTA

Masih berkatut seputar kulineran khas, bagi konco pemelajar yang ingin memanjakan lidah tanpa harus berjauhan dari lokasi BDK Yogyakarta, dapat memilih opsi kuliner terdekat yang dijamin menjanjikan kelezatan khas Jogja.

1. Soto Bathok Mbah Katro yang terletak di daerah Sambisari ini memiliki arsitektur bangunan unik yaitu berupa rumah kayu semi *outdoor* memanjang dengan lokasi di tengah sawah yang membuat suasana sejuk dan nyaman. Warung ini menyajikan soto dalam mangkok yang terbuat dari batok kelapa. Uap hangat yang mengepul dari soto dengan taoge dan irisan daging sapi beraroma rempah kuat, ditemani berbagai menu pelengkapanya seperti sate usus, sate ati ampela, telur puyuh tusuk, dan tempe goreng yang sangat krispi dan gurih, dijamin akan menggugah selera bagi tamu yang berkunjung.



SOTO BATHOK

2. Sop Djadoel Sambisari menawarkan sensasi kuliner lain untuk pengunjung. Menu utama yang ditawarkan adalah Sop Jadoel, Sop Kuning, dan Sop Kedondong. Sop Jadoel menyajikan sop dengan sedikit campuran santan namun memiliki rasa yang cukup ringan. Sop Kuning memiliki aura bening kekuningan namun lebih mantap karena ada sedikit rasa *spicy* yang menggigit lidah. Adapun sop kedondong memiliki keunikan rasa serta kesegaran yang tidak dapat dibandingkan dengan kedua sop sebelumnya. Rasa asam dari kedondongnya memberi sensasi kesegaran yang membuat sop ini begitu lezat. Untuk melengkapi sop, dapat diisi dengan pilihan potongan iga sapi yang lembut dan gurih, daging ayam, iga, buntut, ati ampela, ceker atau kepala gurami. Selain itu terdapat menu pendamping yang bervariasi yakni pisang goreng/rebus, bakwan, mendoan, tahu isi, jadah goreng, kacang rebus dan juga sawut (makanan dari ketela yang diserut kemudian dikukus).



SOP JADOEL

3. Pulen Kopi Ponti, terletak di daerah Purwomartani-Kalasan. Sesuai namanya, resto ini menyajikan berbagai macam kopi dan menu favoritnya adalah Kopi Pontianak. Bukan hanya kopi saja, resto ini juga menghadirkan berbagai sajian prasmanan khas Jawa yang menggugah selera, seperti sayur asem, rawon, soto ayam, sayur lodeh, tempe bacem, perkedel jagung, brongkos, asem, tumis, pepes, telur balado dan telur asin. Yang menarik, resto ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk ngopi dan makan saja, namun juga dijadikan tempat untuk berkumpul bersama teman dan *working space* yang cukup nyaman.



PULEN KOPI PONTI

Sumber: https://makanjogja.com/Pulen-Kopi-Ponti-Sajian-Prasmanan-Khas-Jawa-yang-Menggugah-Selera_kuliner2028.html

"Jogja terbuat dari rindu, pulang dan angkringan." Begitu penggalan sajak yang ditulis penyair Joko Pinurbo yang kerap dikutip sebagian orang sebagai ungkapan kerinduan terhadap Yogyakarta. Selain sudut kota yang selalu menggores kenangan, angkringan pun menjadi salah satu alasan orang untuk pulang alias bernostalgia. Angkringan di Jogja ibarat bintang di langit, tersebar di mana-mana di seluruh penjuru kota yang dijelajahi. Setiap angkringan pun memiliki kisah dan romantika masing-masing tentang kebersahajaan, keramahan, kesederhanaan, dan kelezatan sajiannya. Ada beberapa angkringan legendaris yang akan menggugah memori indah di Jogja, beberapa di antaranya adalah Angkringan Lik Man di sebelah utara stasiun tugu, Angkringan Wijilan di daerah Kecamatan Kraton dan Angkringan KR/Pak Jabrik depan kantor harian KR daerah Malioboro. Menu utama yang disajikan biasanya terdiri dari nasi kucing, aneka sate seperti sate usus-telur puyuh-rempelo ati, dan berbagai macam gorengan serta berbagai varian minum hangat untuk menemani kenikmatan makan para pengunjung.

Jogja adalah sang pemikat yang mudah membuat jatuh cinta siapapun yang datang berkunjung. Dengan segala keistimewaan, kesederhanaan, keramahan, keanggunan budaya, kuliner dan tradisi yang melekat menjadi alasan banyak orang untuk berlama-lama di kota ini. Semua sudut kota beserta infrastruktur pendukungnya yang unik, menarik dan artistik menjadi penegasan bagi Jogja untuk menyandang gelar istimewa. Tidak salah jika Ndarboy Genk menuangkan kekagumannya terhadap Jogja dalam bait akhir lagunya yang sedang fenomenal, ".. koyo kotaku Jogja, kowe cen istimewa ". Jadi mau menunggu apa lagi?? Yuk konco pemelajar, istimewa diri anda dengan berkunjung ke Jogja dan menikmati berjuta pesona yang tersedia. Sambil belajar tentu saja!!!



ANGKRINGAN PAK JABRIK

Sumber: <https://food.detik.com/berita-boga/d-5730003/angkringan-pak-jabrik-tempat-ngumpul-komunitas-yang-punya-kopi-jos-dan-nasi-mercon>

STOP

A photograph showing a person in a light blue shirt with their hands held up in a 'stop' gesture. In the foreground, another person's hands are holding a brown paper envelope. The scene is framed by a dark, torn-paper-like border at the top and bottom.

GRATIFIKASI

gol.kpk.go.id

Laporan gratifikasi yang disampaikan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK.

FOTO: EFRI CANDRA HANANTO

GALERI GALERI BALI BALI



SUASANA PAGI DI KAWASAN TELUK GILIMANUK, BALI



TAMAN DEDARI, KAWASAN WISATA DI DAERAH UBUD DENGAN NUANSA PATUNG DEDARI YANG MELAMBANGKAN KECANTIKAN BIDADARI.



UNITY IN KINTAMANI, PERPADUAN EKSOTIS GUNUNG, DANAU, DAN SAWAH DI KAWASAN KINTAMANI, BALI.



GRADASI WARNA KELINGKING BEACH NUSA PENIDA YANG SANGAT MEMANJAKAN MATA



SUSUNAN BEBATUAN DIAMOND BEACH YANG MENYATU DENGAN LANGIT CERAH PULAU NUSA PENIDA



LAKE BATUR, DANAU TERBESAR YANG TERLETAK DI PULAU BALI

GALLERY BALI

ISSN: 2086-4833



9 712086 483008

#belajartanpabatas

TANYA TENTANG BPPK DISINI



Atau bisa juga menghubungi:

Email Hubungi Kami:

bppk.hubungikami@kemenkeu.go.id

Hotline Chat Whatsapp

+62 812-9819-6377

bppk.kemenkeu.go.id